

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TRI KOMANDO RAKYAT

**Usaha Mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan
Republik Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

AG. SUWANDI

NIM : 971314038

NIRM : 973051120604120024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

TRI KOMANDO RAKYAT

**Usaha Mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan
Republik Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Di Universitas Sanata Dharma

Oleh :

AG. SUWANDI

NIM : 971314038

NIRM : 973051120604120024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

1998

TRI KOMANDO RAKYAT

Usaha Mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan
Republik Indonesia

SKRIPSI

Disusun oleh :

AG. SUWANDI

NIM : 971314038

NIRM : 973051120604120024

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal

Pembimbing II



Dra. Theresia Sumini, M.Pd

Tanggal

TRI KOMANDO RAKYAT

Usaha Mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan
Republik Indonesia

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

AG. SUWANDI

NIM : 971314038

NIRM : 973051120604120024

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 2 Desember 1998

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. A.K. Wiharyanto

Sekretaris : Drs. B. Musidi M.Pd

Anggota : 1. Drs. A.K. Wiharyanto

2. Dra. Th. Sumini M.Pd

3. Dr. P.J. Suwarno SH

Yogyakarta, tanggal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta



Dekan,

Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmad-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial.
2. Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Dra. Theresia Sumini M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi semangat, dukungan, koreksi dan banyak masukan, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
5. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelayanan berupa peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Di satu pihak penulis bertanggung jawab atas otentisitas skripsi ini dan di lain pihak penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan, baik pemikiran, kritik maupun saran yang bersifat membangun, demi penyempurnaannya. Semoga skripsi ini di kemudian hari dapat berguna bagi siapa saja.

Yogyakarta, Nopember 1998

Penyusun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Abstrak	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfa'at Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II. DASAR PENCANANGAN TRI KOMANDO RAKYAT	15
A. Dasar Historis	15
a. Sriwijaya	15
b. Majapahit	18
c. Sumpah Pemuda	20
d. Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia	23
B. Wawasan Nusantara	26
a. Sebagai pengikat kesatuan wilayah Sabang-Merauke	26
b. Sebagai batas landasan kontinental wilayah Republik Indonesia	28
BAB III. PERJUANGAN DIPLOMASI SEBELUM TRI KOMANDO RAKYAT .	32
A. Konferensi Meja Bundar	32
B. Kabinet Natsir	34
C. Kabinet Sukiman	37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Kabinet Wilopo	39
E. Kabinet Ali Sastroamijoyo I	40
F. Kabinet Burhanuddin Harahap	42
G. Kabinet Ali Sastroamijoyo II	44
H. Kabinet Juanda	47
BAB IV. PELAKSANAAN TRI KOMANDO RAKYAT	49
A. Konfrontasi Ekonomi	49
B. Persiapan Perang	50
C. Pertempuran Laut Aru	55
BAB V. REAKSI DAN DAMPAK TRI KOMANDO RAKYAT	58
A. Reaksi Negara-Negara Barat	58
B. Reaksi Negara-Negara Berkembang	65
C. Perubahan Sikap Amerika Serikat	70
D. Perjanjian Bunker	76
E. Pepera	80
F. Irian Barat Menjadi Propinsi ke-26	82
BAB VI. KESIMPULAN	86
 DAFTAR PUSTAKA	89

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Ag. Suwandi, *TRI KOMANDO RAKYAT, Usaha Mengembalikan Irian Barat Ke Pangkuan Republik Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta : Prodi Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma, Nopember 1998.

Pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang : pertama, penancangan Tri Komando Rakyat; ke dua, perjuangan diplomasi sebelum Tri Komando Rakyat; ke tiga, pelaksanaan Tri Komando Rakyat dan ke empat, reaksi dan dampak Tri Komando Rakyat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dengan penelitian kepustakaan ini, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data-data yang mendukung konsep rekonstruksi, sebagian besar dalam bentuk pernyataan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meliputi wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang hingga ke Merauke, masih belum seutuhnya tercapai. Daerah Irian Barat masih diduduki oleh Belanda. Belanda menganggap bahwa Irian Barat bukan bagian dari wilayah Indonesia dan penduduknya bukan pula bangsa Indonesia. Tidak ada alasan apapun bagi Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

KMB yang menunda pembicaraan tentang Irian Barat, hanya dipakai sebagai taktik Belanda untuk memperkuat pendudukannya atas Irian Barat dan memisahkannya dari RIS, karena dalam pembentukan RIS Irian Barat tidak disebut-sebut sebagai bagian dari RIS. Usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah RI yang dimulai sejak Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Ali Sastroamijoyo II tidak pernah membuahkan hasil. Belanda justru mendirikan Dewan Papua pada tanggal 5 April 1961, dengan berbendera sendiri, sebagai usaha untuk melepaskan Irian Barat dari wilayah kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah selama 12 tahun usaha melalui diplomasi selalu gagal, maka pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mencanangkan Tri Komando Rakyat yang bersifat konfrontatif terhadap Belanda. Dimulai gugurnya Komodor Yos Sudarso pada pertempuran Laut Aru yang tidak seimbang, maka RI menyiapkan perang secara besar-besaran untuk menghalau Belanda dari Irian Barat. Persiapan perang ini masih diimbangi oleh usaha diplomasi Menlu Subandrio ke Amerika Serikat, untuk menemui Presiden John F. Kennedy.

Atas tekanan Presiden Kennedy, Belanda bersedia berdamai dengan RI melalui Perjanjian Bunker. Akhirnya Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan RI melalui UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963, maka Irian Barat tidak dapat dipisahkan lagi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Ag. Suwandi, *TRI KOMANDO RAKYAT (Three Orders of The People)*, The effort to ask back West Irian to the Republic of Indonesia's territory, Paper, Yogyakarta : History Study Program of FKIP Sanata Dharma University, Yogyakarta. November, 1998.

The main problem which is becoming the research object of the paper is describing and analysing about : first, proclaiming the three orders of people; second, diplomacy struggle before the three orders of people; the third, the implementation of the three orders of people and the fourth is the reaction and the effect of the three orders of people.

The method used in this research is a library reseach. By using this reseach, the writer would like to explore the basic theory and concept revealed by the reseachers. In compiling this paper, the writer is using the qualitative method as most of the data which support this compilation are in statement forms.

The result of the research reveals that Proclamation of Independence, 17 th August 1945 which covered an integral part of former Netherland East Indies from Sabang to Merauke had not been recognized yet. West Irian was still occupied by the Dutch. The Dutch still thought that West Irian was not an integral part of Indonesia and neither were its population. No other reason for the Dutch to transfer West Irian to promote complete sovereignty for the territory of the Republic of Indonesia.

The Round Table Agreements which postponed the talk about West Irian was only used as a tactical maneuver by the Dutch to strengthen its occupation on West Irian as well as to separate West Irian from the integral part of Indonesia. According to the Dutch, it was reasonable because in forming The Union of The Republic of Indonesia, West Irian was not talked about to be a part of it. Diplomacy efforts which were done by the government of The Republic of Indonesia since Natsir Cabinet to Ali Sastroamidjojo II Cabinet never succeeded. On the other hand, the Dutch established Papua Council on 5th April 1961 in order to release West Irian from the integral part of The Indonesian Sovereignty.

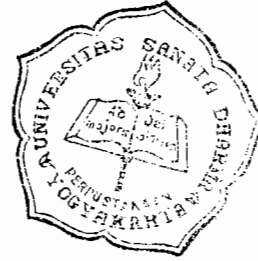
After unsuccessful diplomacy efforts for 12 years had been done, on December 1961, President Soekarno declared Three Orders of People to confront with The Dutch. On this confontation, Commodore Yos Sudarso died on unbalanced battle in Aru Sea. After that The Republic of Indonesia declared to fight against the Dutch and wanted to wipe out the Dutch colonialism from the West Irian. This effort followed by the diplomacy effort to United State led by Foreign Minister Subandrio to see President John F. Kennedy.

Because of John F. Kennedy's pressure, The Dutch was willing to have peace talk. It was called Bunker Peace Agreement. Finally, West Irian was transfered to The R epublic of Indonesia under the jurisdiction of a United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), 1st May 1963, after a plebiscite on self-determination of West Irian's population . Since that time, West Irian cannot be separated from the sovereignty of the Republic of Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Semangat persatuan yang dijiwai nasionalisme, patriotisme, heroisme dan kerakyatan, dengan dilandasi oleh sikap dan jiwa percaya kepada kemampuan sendiri, akan mampu pula menolong kepada diri sendiri. Kepercayaan kepada kemampuan sendiri yang sarat dengan nilai-nilai religiusitas, ternyata berhasil menggembleg semangat rakyat, yang telah menggumpal sebagai cita-cita nasional, untuk merebut kemerdekaan sebagai jembatan emas, demi memperbaiki dan meningkatkan derajat dan taraf kehidupan bangsa.

Motivasi nasionalisme bangsa Indonesia yang melahirkan tekad "merdeka atau mati" menjadi inti keberanian kekuatan untuk mencetuskan proklamasi 17 Agustus 1945 dan keberanian serta tekad di dalam perjuangan tanpa kenal menyerah mempertahankan kemerdekaan. Meskipun setiap jaman melahirkan tantangan dan tuntutan yang berbeda, namun senantiasa dilandasi oleh suatu misi dan visi yang sama, yaitu mengarah kepada kebebasan gerak dan langkah, menuju kepada terciptanya masyarakat madani yang dinamis. Untuk menuju kearah masyarakat madani yang dinamis, dituntut keberanian merombak keterbelakangan dengan cara meninggalkan feodalisme dan sifat paternalistik yang telah lama terbentuk, baik dalam pola negara kerajaan maupun kungkungan kolonialisme dan imperialisme.

Wujud tantangan yang berkisar pada terpenuhinya tuntutan kesejahteraan material-spiritual dan kebebasan berpolitik maupun berdemokrasi, bagi bangsa Indonesia berjalan di atas garis dinamika historis. Dalam kerangka pelaksanaan cita-cita Proklamasi menuju

terbentuknya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, sangat diperlukan adanya kesamaan persepsi dalam setiap dada putra Indonesia, agar tercipta nation state yang kuat. Dari setiap aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh adanya kesetiaan, karena ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya. (Sis Soebroto, Merdeka, 21/6/1982 : 4).

Kemerdekaan merupakan jalan yang paling mulai bagi setiap bangsa untuk membangun dirinya sendiri, dengan kekuatan sendiri, bebas dari campur tangan bangsa asing, namun juga sangat diperlukan adanya kerja sama antar bangsa yang saling menguntungkan. Membangun pada hakekatnya adalah merubah nasib diri sendiri dalam hubungan kebersamaan dengan bangsa lain, untuk meningkatkan taraf hidup material dan spiritual menjadi lebih baik. Semangat ini perlu dimiliki oleh setiap orang, dipupuk dan dikembangkan sejak dari keluarga, masyarakat dan meluas ke segenap warga negara. Solidaritas sosial dan solidaritas nasional perlu terus didorong dengan semangat partisipatif dan toleransif, sehingga mampu mengatasi segala tantangan di depan kita.

Dengan dimatangkan oleh pengalaman, didorong cita-cita kemerdekaan yang semakin kuat, serta matangnya kondisi dan situasi nasional maupun internasional, maka bangsa Indonesia akan selalu berani menghadapi musuh kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kemerdekaan hanyalah dapat dipakai oleh bangsa yang bersatu dan kesatuan hanyalah dapat dicapai oleh kehendak yang sama bagi semua golongan. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah merupakan rohnya nasionalisme, yang lahir dari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, akibat dari penderitaan yang sama dan cita-cita yang sama pula, yaitu kebebasan dari segala bentuk penindasan (Soekarno, 1926).

Klaim suci tentang wilayah Negara Republik Indonesia, yang meliputi seluruh

wilayah bekas Hindia Belanda di Nusantara ini, sungguh-sungguh dapat tercapai secara bulat setelah dikobarkannya semangat TRI KOMANDO RAKYAT. Tri Komando Rakyat terpaksa dikumandangkan, karena perjuangan melalui cara-cara diplomasi dan ekonomi gagal untuk menyadarkan kolonialis Belanda. Dengan kegagalan tersebut, maka diusahakan agar daerah Republik Indonesia di sekitar Irian Barat dibangun lebih maju, dengan segala potensinya di berbagai bidang, untuk memudahkan usaha membebaskannya dari cengkeraman imperialisme Belanda (Soepardo, 1960 : 405).

Belanda mengatakan bahwa Irian Barat bukan menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena daerahnya masih sangat terbelakang, masih merupakan hutan lebat dengan gunung-gunungnya yang mencakar langit dan daerah rawa yang sangat luas (Samawi, 1970 : 112). Irian Barat didiami oleh penduduk yang berkulit hitam dan masih sangat primitif dengan menggunakan alat-alat dari batu, kulit lokan dan tongkat. Dilihat dari segi etik dan budayanya, rakyat Irian Barat tidak termasuk bangsa Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Belanda mau memanusiasikan penduduk Irian Barat dan setelah mengalami kemajuan, maka akan dimerdekakan sesuai dengan aspirasi mereka (Nugroho N, 1986 : 83).

Usaha-usaha Republik Indonesia melalui jalan diplomasi sampai dengan tahun 1960 tidak pernah membuahkan hasil, sehingga setelah tahun demi tahun berlalu tanpa penyelesaian, bagi Indonesia semakin tidak sabar menanti. Di PBB para Diplomat Indonesia selalu dihina dan diabaikan, padahal mereka senantiasa bertindak baik dan sopan dalam mengucapkan pidatonya. Mereka selalu mengoreksi, membaca kembali, mengetik lagi naskah yang akan dipidatokan dengan penuh hati-hati, agar tidak menyinggung perasaan imperialisme, yang masih tetap mentertawakannya pada waktu

menolak usulan damai. Dengan sabarnya wakil-wakil dari Indonesia tetap dapat mengendalikan diri, atas penghinaan pada delegasi Belanda.

Dalam Sidang Umum PBB di tahun 1960, sebelas tahun seharusnya setelah janji Belanda "dalam waktu satu tahun" sudah selesai, namun Belanda tetap menolak. Menlu Belanda menjelaskan, bahwa negeri Belanda bersedia mendekolonisir Nieuw Guinea dan kemudian menentukan keinginan sesungguhnya dari penduduk asli (Samawi, 1970 : 110). Mereka boleh memilih masih mau di bawah bendera tiga warna, atau ingin berdiri sendiri, atautkah ingin bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga Belanda tidak akan campur tangan. Janji-janji Belanda ini sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, karena setiap janji dengan melontarkan kutukan, bahwa Soekarno adalah saudagar perang, fasis diktator, sehingga Indonesia menjadi ragu-ragu akan setiap janji Belanda (Cindy Adams, 1966 : 424).

Hasil persetujuan KMB, jelas menunjukkan bahwa masalah Irian Barat masih belum selesai. Bekas Nederland Indie diserahkan kepada RIS kecuali Irian Barat dan akan diserahkan satu tahun kemudian. Dengan berpegang kepada isi Piagam Penyerahan Kedaulatan, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, Indonesia masih tetap berusaha, agar masalah Irian Barat tetap dapat diselesaikan secara damai.

Usaha penyelesaian secara damai ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang lebih cinta perdamaian dari pada dengan kekerasan. Apabila perdamaian memang tidak dapat ditempuh, maka perdamaian perlu dikorbankan demi kemerdekaan. Indonesia masih perlu sekali mengusahakan jalan perundingan dalam masalah Irian Barat sesuai dengan pasal 2 dari Piagam Penyerahan Kedaulatan (Nugroho N, 1986 : 85).

Usaha diplomasi Indonesia melalui berbagai cara ini, oleh Belanda dipergunakan

sebagai kesempatan untuk melanjutkan kekuasaannya di Irian Barat dengan memperkuat pertahanannya. Setiap kali diadakan perundingan, selalu digagalkan oleh Belanda dengan segala daya dan tipu muslihatnya.

Jalannya diplomasi untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, telah dirintis oleh Kabinet Natsir pada bulan Desember 1950, sesuai pasal 2 Piagam Penyerahan Kedaulatan dan pasal 20 Piagam PBB, namun juga mengalami kegagalan. Akibat gagalnya diplomasi yang telah ditempuh, Kabinet Natsir mengeluarkan pengumuman yang berbunyi : "Indonesia tetap mempertahankan tuntutannya atas Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia" (Baharuddin Lopa, 1962 : 58). Prakarsa Kabinet Natsir tersebut kemudian diteruskan oleh Kabinet-Kabinet selanjutnya.

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat gambaran secara umum pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Dasar-dasar apakah yang digunakan dalam pencanangan Tri Komando Rakyat ?
2. Sejauh mana perjuangan diplomasi RI sebelum Tri Komando Rakyat dicanangkan ?
3. Bagaimana pelaksanaan Tri Komando Rakyat ?
4. Bagaimana reaksi dan dampak Tri Komando Rakyat ?

Demikianlah permasalahan-permasalahan pokok yang akan dijawab dalam keseluruhan isi skripsi ini.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui secara mendalam tentang Tri Komando Rakyat, sebagai perwujudan

usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan khusus :

- a. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang dasar pencanangan Tri Komando Rakyat.
- b. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang perjuangan diplomasi sebelum Tri Komando Rakyat.
- c. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang pelaksanaan Tri Komando Rakyat.
- d. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang reaksi dan dampak Tri Komando Rakyat.

D. Manfa'at Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma :

Untuk melaksanakan salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan sosial.

2. Bagi Dunia Keguruan Dan Ilmu Pendidikan :

Penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah Indonesia, khususnya sejarah tentang proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bagi Peneliti :

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peranan Tri Komando Rakyat, dalam usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul : TRI KOMANDO RAKYAT, Usaha Untuk Menyatukan Kembali Irian Barat Ke dalam Wilayah Republik Indonesia. Untuk penulisan ini perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi.

Tri Komando Rakyat merupakan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman kolonialis dan imperialis Belanda. Sebelum Irian Barat bebas dari penjajahan, Negara Kesatuan RI masih merasa belum bebas dari penindasan Belanda, sehingga perlu sekali meneruskan pergerakan perjuangan untuk mencapai kebulatan kedaulatan nasional (Samawi, 1970 : 108)

Pergerakan pada umumnya adalah bersifat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, untuk mengakhiri penjajahan, dan terorganisasi secara teratur (Soesanto Tirtoprodjo, 1989 : 7). Demikian juga Tri Komando Rakyat merupakan gerakan yang terorganisasi secara teratur untuk membulatkan kedaulatan Negara Kesatuan RI, termasuk Irian Barat.

Membahas Tri Komando Rakyat, selalu berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, yang lahir dari adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan yang sama, yang kemudian menumbuhkan suatu cita-cita yang sama, yaitu kebebasan. Soekarno mempersonifikasikan dengan Front Marhaenis tentang nasionalisme Indonesia, dimana penderitaan Pak Marhaen dan rakyat kecil di seluruh Nusantara, telah sangat menderita oleh tindakan sewenang-wenang Belanda (Ir. Soekarno, 1964 : 168).

Dengan masih terbelahnya hubungan geografis dan politis antara Irian Barat dengan wilayah Negara Kesatuan RI yang lain, maka sangat diperlukan adanya usaha untuk menyatukannya dengan berbagai jalan. Persetujuan Roem Royen dengan tegas

menyebutkan, bahwa Pemulihan Kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat bersifat real, complete and unconditional. Penyerahan Kedaulatan akan dijalankan secara penuh, tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali. Pemulihan Kedaulatan atas Indonesia adalah bekas Hindia Belanda (Samawi, 1970 : 110).

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, belum sepenuhnya bulat sampai dengan dasawarsa pertama setelah KMB. Usaha menggalang kekuatan untuk terus mengorganisir persatuan dan kesatuan bangsa, belum menggoyahkan sikap Belanda yang terus mencengkeram Irian Barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum bulat ini, menumbuhkan kesadaran bagi setiap putra Indonesia untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi mereka secara individu kepada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1961 : 11).

Semangat cinta bangsa dan tanah air (nasionalisme) mempunyai perwujudan demi menegakkan negara-negara bangsa, yang telah diproklamirkan sejak revolusi, dengan mengangkat senjata untuk mengusir musuh sebagai tentara atau sukarelawan. Masing-masing warga secara individual atau kolektif, berjuang mengisi kemerdekaan dan membulatkan kedaulatan, agar tujuan negara bangsa yang telah disepakati bersama dapat terwujud (S. Adikusilo J.R., 1996 : 1).

Menurut Prof. Sartono Kartodirdjo (Kompas, 28/2/1989) bahwa nasionalisme masih sangat relevan dan tidak perlu disangsikan, asal masih mempertahankan prinsip-prinsip untuk mewujudkan dan mempertahankan persatuan, kebebasan, kesamaan, individualitas dan prestasi sebagai bangsa. Nasionalisme Indonesia akan terus berlanjut sepanjang masa, meskipun harus disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Dalam hal keutuhan wilayah, perasaan senasib dan sepenanggungan yang melahirkan cita-cita dan tujuan bersama, dapat terkonsolidasi dengan sendirinya untuk membebaskan diri dari

belenggu penjajahan.

Menurut Sejarawan Carlton J.H. Hayes (1956), menyebutkan bahwa ada faktor-faktor obyektif seperti faktor politik (penjajah), faktor sosial, faktor ekonomis, faktor budaya dan lain-lain, serta faktor subyektif seperti dogma, ide pemikiran dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut dari waktu ke waktu dapat saja berubah. Sebagai contoh faktor nasionalisme Indonesia pra kemerdekaan antara lain adalah penjajahan kolonial dan setelah menjadi merdeka berubah faktornya, misalnya kesewenang-wenangan penguasa, korupsi, monopoli, ketidakadilan dan lain-lain. Setiap manusia akhirnya sesuai dengan kondisi masing-masing tertantang untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara bangsa (S. Adisusilo J.R., 1996 : 1).

Semasa Tri Komando Rakyat, semangat nasionalisme Indonesia tertantang oleh sikap keras kepala Belanda, sehingga timbullah benturan ideologi antara kolonialisme dan imperialisme di satu pihak dengan nasionalisme di lain pihak. Nasionalisme Indonesia menjadi faktor obyektif yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, sehingga cita-cita untuk membulatkan kedaulatan seluruh kawasan Nusantara menjadi wajib untuk dilaksanakan. Kolonialisme dan imperialisme Belanda, memandang atas penguasaan Irian Barat sebagai kepentingan ideologinya (subyektif), sehingga harus dipertahankan dengan segala cara (Nugroho N, 1986 : 39).

Dari dua kepentingan yang saling berlawanan seperti dua kutub yang berbeda ini, menyebabkan timbulnya kesulitan untuk saling mendekatkan diri satu sama lainnya. Usaha diplomasi dari pandangan nasionalisme Indonesia, betapapun sulitnya akan dapat dicapai suatu kesepakatan yang damai, namun ternyata Belanda memandang dari dirinya sendiri yang selalu dilandasi oleh subyektivisme. Sejak dikeluarkannya Piagam Penyerahan Kedaulatan kepada RIS, mulai tampak adanya perbedaan persepsi dan argumentasi dari

kedua belah pihak, sehingga menyebabkan setiap usaha diplomasi yang dijalankan oleh RI selalu mengalami kegagalan (Nasution, 1985 : 231).

Perjuangan yang terus dilakukan oleh bangsa Indonesia, dalam usaha mencapai kebulatan wilayah kekuasaan RI, terus digalakkan seiring dengan pelaksanaan diplomasi baik secara langsung, maupun dengan perantaraan negara lain atau dalam forum PBB. Perjuangan di forum internasional yang senantiasa mengalami kegagalan, semakin mempertebal semangat RI untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut yang diadakan oleh PBB di Geneva pada tahun 1958. Konferensi selanjutnya diadakan pada tahun 1960, yang membicarakan masalah Indonesia (S.W.Qomaruddin, 1966 : 32).

Perjuangan di forum internasional ini juga belum berhasil, sehingga pemerintah RI merasa perlu menciptakan landasan hukum laut yang kuat bagi Deklarasi Juanda untuk mengikat Irian Barat ke dalam lingkup Wawasan Nusantara. Pada tanggal 18 Pebruari 1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960, tentang perairan Indonesia yang berisi :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar.
2. Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut wilayah lautan teritorial selebar 12 mil diukur dari garis-garis lurus.
4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelagic waters), negara berdaulat atas perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini dijamin selama tidak merugikan kepentingan dan mengganggu keamanan dan ketertiban (Nugroho N, 1981 : 121).

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah terbentuk sejak tanggal 17 Agustus 1950 makin memperkokoh usaha untuk membulatkan kedaulatan Republik Indonesia termasuk Irian Barat yang masih dijajah oleh Belanda. Menurut Prof. Kahin dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai suatu yang wajar dan sehat. Dengan terbentuknya NKRI, maka selesailah taraf revolusi nasional kita, karena dengan terbentuknya NKRI terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan dan tinggal Irian Barat yang harus terus diperjuangkan. Revolusi masih menghadapi hambatan untuk terwujudnya amanat proklamasi, sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan RI (Moedjanto, 1988 : 74).

Bukan saja Irian Barat bagi kita ditinjau dari sudut percaturan politik dunia sangat penting artinya. Bukan saja Irian Barat bagi kita ditinjau dari segi ekonomi, besar juga artinya, namun lebih dari itu semua, bahwa Irian Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Melepaskan Irian Barat berarti kita berkhianat terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berkhianat kepada anak cucu bangsa Indonesia, berdosa kepada sebagian rakyat Indonesia yaitu rakyat di Irian Barat (Nugroho N, 1986 : 41).

Politik Apartheid bangsa Boer, terhadap penduduk asli Afrika Selatan, menimbulkan kekhawatiran bangsa Indonesia apabila Belanda masih bercokol di Irian Barat. Rakyat Irian Barat secara perlahan-perlahan akan dimusnahkan oleh penduduk kulit putih, sama halnya dengan penduduk Aborigin di Australia yang semakin berkurang. Dunia telah menyaksikan, selama Irian Barat dijajah, penduduk aslinya tidak pernah mendapatkan kemajuan apa-apa dan tetap primitif (Nugroho N, 1986 : 42).

Dari tahun ke tahun soal Irian Barat ini dirundingkan dengan Belanda, namun tidak ada hasilnya, karena uluran tangan Indonesia tidak pernah mendapatkan respon dari

Belanda. Usaha pengembalian Irian Barat dengan jalan damai sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan, karena Belanda tetap bertahan dengan pendiriannya. Dengan pengalaman yang telah berulang kali ini, habislah kesabaran bangsa Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah dengan senjata (Moedjanto, 1988 : 122).

Irian Barat daerah wilayah Indonesia, seluruh rakyat siap sedia, dari Sabang hingga ke Merauke, menyusun segala daya perkasa, untuk menghancurkan penjajah angkara. Cukup sudah dialami. Kini tiba sa'at rakyat bertindak, bersatu padu bebaskan Irian untuk kejayaan nusa dan bangsa. Mempertahankan Proklamasi Negara Republik Indonesia (sya'ir Kusbini, 1961).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Reseach). Dengan penelitian kepustakaan ini, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data-data yang mendukung proses rekonstruksi, sebagian dalam bentuk pernyataan. Studi pustaka semakin menjadi sebuah pilihan yang cukup rasional (I Gusti Ngurah Agung, 1992 : 9).

Melalui studi pustaka, penulis berusaha mencari data-data yang telah didokumentasikan secara tertulis, baik dalam bentuk buku-buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi atau bentuk-bentuk publikasi lainnya. Dari sejumlah literatur tadi, penulis mengambil teori-teori, hukum, dalil, atau konsep-konsep para ahli yang terdapat dalam sejumlah literatur tersebut. Penulis secara aktif mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang sedang diteliti, memanfaatkan data-data sekunder maupun primer dan menghindari publikasi penelitian, agar dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah, yang

benar-benar obyektif (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987 : 45).

Penulis lebih banyak menggunakan data historis, yaitu pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena sosial secara temporal, yang menjadi stempel pembentuk, sehingga terwujud keadaan seperti sekarang (Sartono K, 1977 : 6). Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan, yaitu dengan cara menggeneralisasikan semua sumber yang didapat, guna memunculkan kesimpulan (Sartono K, 1977 : 7).

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari berbagai permasalahan, yang telah ditegaskan dalam perumusan masalah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penelitian subyek untuk diselidiki.
2. Menemukan sumber selengkap-lengkapya.
3. Mengkritik sumber dengan tujuan menguji otentisitas dengan kritik ekstern dan kritik intern.
4. Sintesa sumber keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan.
5. Menganalisis sumber keterangan.
6. Membandingkan sumber lain yang otentik.
7. Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh.
8. Penulisan laporan sejarah (Sumadi S, 1989 : 21).

Oleh karena penulisan skripsi ini menyangkut bidang studi sejarah, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Metode ini memiliki pengertian sebagai suatu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dan perspektif historis suatu masalah.

Melalui metode deskriptif analitik, peristiwa-peristiwa sejarah berusaha diuraikan berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan. Disamping menggunakan metode deskriptif analitik, penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan multi-dimensional. Maksudnya adalah agar penulisan peristiwa sejarah menjadi lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks (Sartono K, 1977 : 4).

Ditinjau dari jenis aktivitasnya, penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian interpretasi kritis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran, mengenai suatu masalah dalam bentuk uraian kritis dan logis, sesuai dengan fakta, jelas dan rasional (Masri Singarimbun, 1987 : 59). Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.
- BAB II : Menguraikan tentang dasar pencanangan Tri Komando Rakyat, yang menyangkut dasar historis dan wawasan Nusantara.
- BAB III : Menguraikan tentang perjuangan diplomasi sebelum Trikora, yang menyangkut kegiatan-kegiatan Kabinet yang silih berganti dalam perjuangan merebut Irian Barat.
- BAB IV : Menguraikan tentang pelaksanaan Trikora, konfrontasi ekonomi dan fisik.
- BAB V : Menguraikan reaksi dan dampak Trikora, yang menyangkut reaksi negara-negara Barat, dukungan terhadap RI, perubahan sikap Amerika, perjanjian Bunker, Pepera dan Irian Barat sebagai propinsi ke 26.
- BAB VI : K e s i m p u l a n.

BAB II

DASAR PENCANANGAN TRI KOMANDO RAKYAT

A. Faktor Historis

a. Sriwijaya

Sebagai suatu negara sarwajala (maritim) yang terus berkembang, Sriwijaya tidak mungkin membatasi diri pada penguasaan di jalan laut sekitarnya saja. Paksaan berlabuh bagi para avonturir perniagaan dengan segala konsekuensinya adalah merupakan hasil utama yang didapatkan dari situasi sejarah di Asia Tenggara. Sriwijaya adalah suatu negara berniaga yang ikut serta dalam perniagaan internasional (Burger, 1960 : 29).

Sriwijaya bukan saja menghisap kekayaan perniagaan dunia, melainkan berperan serta dan merupakan sumber kekayaan perdagangan dunia juga. Sriwijaya yang mula-mula hidup membajak laut di sekitarnya, kemudian berkembang menjadi pusat perniagaan dunia (Moh. Ali, 1962 : 29). Kunci perniagaan dunia khususnya di Asia Tenggara, yang menjadi penghubung dunia Barat dengan dunia Timur dipegang oleh Sriwijaya, sehingga ia mampu mengatur distribusi perdagangan ke seluruh dunia.

Untuk dapat memahami perjalanan sejarah Sriwijaya dalam arti kuno, perlu ditegaskan terlebih dahulu tentang arti perniagaan itu sendiri. Perdagangan ini mula-mula dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan keraton-keraton, yaitu raja-raja dan para bangsawan. Yang diutamakan adalah barang-barang serba mewah antara lain perhiasan, sutera, permadani, porselin, kayu wangi, minyak-minyak dan rempah-rempah (Burger, 1960 : 30).

Dari adanya kebutuhan tenaga kerja, kemudian berkembang ke arah perdagangan budak, manusia kerdil, manusia berkulit hitam dan binatang-binatang seperti gajah, harimau, kera, burung cenderawasih dan binatang lainnya. Dalam bidang pangan beras merupakan kebutuhan masyarakat di seluruh Nusantara. Bahan non beras seperti jagung, ketela, sagu dan lain sebagainya menjadi makanan tambahan yang berlimpah-limpah hasilnya.

Sriwijaya sebagai pengimpor gading, kulit dan beberapa jenis binatang lain, mempunyai cita-cita untuk menguasai ekspor dari seluruh kepulauan Nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sriwijaya memperluas kekayaannya dan kekuasaannya di seluruh perairan Nusantara, khususnya di Laut Jawa, Laut Banda, bahkan Lautan Pasifik di sekitar pulau Irian (Ali R.M., 1962 : 30).

Kerajaan-kerajaan Laut di seluruh Nusantara mengakui hak pertuanannya, sehingga Sriwijaya menjadi pemegang imperium di bumi Nusantara pada jamannya. Kebesaran Sriwijaya pada mulanya disebabkan oleh runtuhnya kerajaan Camboja yang pernah menguasai perairan di Asia Tenggara dan laut Cina Selatan. Sebagai penghubung antara jalan perdagangan dari Lautan India dengan kepulauan Nusantara menuju ke Cina. Camboja merupakan terminal yang paling strategis dalam hal hubungan perniagaan, dari Barat dan Timur ke Utara (Cina) (Burger, 1960 : 29).

Setelah kerajaan Camboja runtuh, maka di Laut Cina Selatan banyak perompak dan bajak laut yang sangat mengganggu. Gangguan keamanan ini sangat mengkhawatirkan para pedagang, baik dari Barat maupun dari kepulauan Nusantara bagian Timur. Para pedagang yang takut menuju ke Utara lewat Laut Cina Selatan, akhirnya menyusuri pulau Bangka dan kebetulan bertemu di pantai Sumatera, di muara sungai Musi. Di tempat inilah terbentuk adanya terminal baru, yang dapat menampung para pedagang, bahkan kebutuhan timbal

balik antara pedagang dari Barat dengan yang dari Timur, dapat tercukupi di tempat ini (Ali R.M., 1962 : 22).

Pedagang dari Barat membutuhkan rempah-rempah dan barang-barang lain dari Timur, sedangkan pedagang dari Timur membutuhkan barang-barang dari Barat. Tukar menukar barang kebutuhan yang tadinya dilakukan di Cina, setelah adanya bajak laut, maka beralih ke muara sungai Musi (Sriwijaya). Kemudian Sriwijaya menjadi bandar pusat, yang mengatur sirkulasi pelayaran, baik dari Barat maupun dari Timur dan berkembang menjadi penjual tunggal dari segala sesuatu yang dihasilkan oleh seluruh kepulauan di Nusantara (Ali R.M., 1962 : 24).

Dari kepentingan keamanan, Sriwijaya dapat memberikan jaminan keselamatan para pedagang dari perampokan bajak laut, yang berasal dari Cina, Malaya, Pilipina dan sebagainya. Tukar menukar barang antar kerajaan di seluruh dunia yang melalui perairan Asia Tenggara diatur oleh Sriwijaya, yang seolah-olah menjadi distributor barang-barang dari Barat maupun dari Timur. Dominasi perairan Nusantara oleh Sriwijaya sampai ke daerah Lautan Pasifik, membuktikan bahwa pulau Irian telah masuk ke jangkauan kekuasaan kerajaan Sriwijaya (Suhardjo H, 1983 : 15).

Kekuasaan Sriwijaya atas kepulauan Nusantara ini, tentu saja tidak seperti lazimnya negara modern yang memiliki nation state seperti sekarang. Dengan kesederhaannya sebagai penguasa lautan, Sriwijaya merupakan yang minimal telah merintis terbentuknya Wawasan Nusantara. Karya dan jasa Sriwijaya dalam konsep historis, tentang kemandirian bangsa Indonesia, telah dapat dibuktikan keberadaannya (Darmono, 1967 : 19).

b. Majapahit

Majapahit timbul dan berkembang sebagai negara agraris dengan politik agresif yang bertujuan perluasan daerah ke segala penjuru. Majapahit merupakan negara pewaris kerajaan Kediri dan Singasari yang mempunyai tradisi pelayaran-perniagaan yang ulung dan pernah menandingi kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Kerajaan Kediri lah yang menjadi dasar perkembangan Majapahit sebagai kerajaan Laut. Pelayaran kerajaan Kediri melalui sungai Brantas sebagai jalan utama, yang dapat menghubungkan daerah pedalaman dengan laut. Surplus upeti kerajaan dapat di ekspor dengan leluasa melalui jalan utama sungai Brantas ini (Ali R.M., 192 : 48).

Dengan mendirikan bandar besar di Canggü, Majapahit dapat menguasai lalu-lintas sepanjang sungai Brantas dan daerah pedalaman dapat dikuasai dengan menggunakan sungai. Sungai ini dilindungi oleh pangkalan-pangkalan yang dibangun dari muara sungai sampai ke daerah udik. Daerah lembah Bengawan Solo dapat dikuasai Majapahit dengan pangkalan dan kubu-kubu pertahanan yang mampu mengawasi lalu-lintas, di sepanjang sungai. Pengawasan pelayaran sungai sangat menguntungkan penarikan bea cukai dari kegiatan perniagaan, baik dari laut maupun dari pedalaman. Kedudukan Majapahit di ke dua sungai tersebut menjadi lebih kuat, dengan pendudukan pangkalan-pangkalan di pulau Madura (Ali R.M., 1962 : 49).

Bandar besar Tuban diperkuat untuk melindungi pantai sekitar muara Bengawan Solo, sehingga sebagai kerajaan sungai, berkembang menuju ke arah kerajaan laut. Sebagai kerajaan darat, kekuasaan Majapahit terletak pada sifat agraris, namun dengan dasar warisan dari kerajaan Kediri sebagai kerajaan sungai, Majapahit menjadi kerajaan laut juga. Dengan meneruskan tradisi lama di atas dasar agraris, namun dengan dasar warisan dari Kediri, maka terbentuklah suatu kerajaan yang bersifat darat-sungai-laut,

dengan potensi manusia serta persediaan bahan makanan, yang luar biasa melimpah (Burger, 1960 : 37).

Pada pertengahan abad 14 Majapahit sudah menjadi kerajaan besar di pulau Jawa, yaitu besar dalam arti khusus. Wilayah Majapahit asli memang tidak luas, tetapi wilayah itu meluas, karena kerajaan-kerajaan di sekitarnya mengakui raja Majapahit sebagai yang dipertuan (Moh. Ali, 1962 : 50). Daerah kekuasaan Majapahit terdiri atas Majapahit sebagai pusat kekuasaan, dengan kerajaan-kerajaan lain yang mengakui hak pertuanan Majapahit.

Kebesaran kerajaan Majapahit bukan sebagai negara besar dalam arti nation state, melainkan lebih disebabkan oleh adanya hubungan maharaja dengan kerajaan-kerajaan lain. Penguasaan terdapat kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara seolah-olah merupakan hubungan pribadi. Bagi Majapahit terkandung kesan dalam bahasa Jawa “nglurug tanpa bala, menang datan ngasorake, hamung kayungyun pepoyaning kautaman (Atmodarminto, 1955 : 34).

Mpu Prapanca dalam buku *Negarakertagama* menyebut daerah-daerah dan pulau-pulau di Nusantara menghambakan diri kepada Majapahit dengan upeti. Selama upeti tetap berlangsung, kerajaan-kerajaan tersebut bebas merdeka, untuk menentukan nasib sendiri, asal tidak menghambakan dirinya kepada maharaja lain. Jadi apabila sumber sejarah *Negarakertagama* dapat dipercaya, kekuasaan Majapahit telah tertanam di seluruh Nusantara (Moedjanto, 1988 : 15).

Terbentuknya Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari konsep historis, tentang kebesaran kerajaan Majapahit. Kekuasaan majapahit meliputi kawasan Asia Tenggara, sehingga ke pulau Irian, Onion (utara Irian), seram, Ternate, Tidore dan kawasan Pasifik lainnya (Ali R.M., 1962 : 52).

Dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, setelah dua kerajaan besar di Nusantara Sriwijaya dan Majapahit runtuh, maka mulailah terjadi avonturisme bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia dan dapat menjangkau kawasan Nusantara juga. Avonturisme ini berkembang menjadi imperialisme dan kolonialisme, yang dapat merubah peta bangsa-bangsa di dunia, baik dari segi kultural, ekonomi, politik dan militer.

Dalam petualangannya, bangsa-bangsa Eropa menjadi bangsa penjajah dan menguasai dunia, dengan segala kelicikan yang dilandasi oleh teknologi modernnya. Bagi kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara yang senantiasa melaksanakan hubungan persahabatan secara damai, kemudian diadu domba oleh bangsa kulit putih dan menyebabkan kawasan Nusantara berubah menjadi kawasan permusuhan. Rekayasa yang dilakukan oleh bangsa kulit putih ini sangat menguntungkan, karena bangsa kulit putih berhasil menerapkan imperialisme dan kolonialismenya di seluruh Nusantara ini.

c. Sumpah Pemuda

Semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan tanah air yang ditanamkan oleh pergerakan kebangsaan sejak jaman perintis, telah tumbuh subur pada setiap dada putra Indonesia. Perjuangan pemuda yang dirintis oleh para mahasiswa PI di negeri Belanda dan para pelajar Stovia ke arah tercapainya kemerdekaan Indonesia, mulai membongkar "PAGAR KESUKUAN" dan mempertebal rasa persatuan nasional (Susanto Tirtiprodjo, 1989 : 75).

Semangat itu mengakibatkan perubahan radikal dalam pengorganisasian dan menyebabkan timbulnya suatu kehendak untuk bersatu dengan cita-cita ke arah Indonesia merdeka. Perasaan satu bangsa berkembang terus dan pada awal tahun 1927 pemuda-pemuda Indonesia di Bandung yang merasa tidak puas dengan berbagai perkumpulan

pemuda daerah, mendirikan Jong Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi ini kemudian hari bergabung dengan PNI tahun 1928 (Moedjanto, 1988 : 56).

Perkumpulan-perkumpulan Pemuda dari berbagai daerah telah bertekad untuk mempersatukan diri, sehingga pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan kongres pemuda-pemuda Indonesia yang pertama. Para pemuda setuju untuk mengembangkan persatuan pemuda Indonesia sebagai suatu bangsa dan bahwa rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan golongan, bahasa maupun agama (Moedjanto, 1988 : 57).

Kerajaan-kerajaan di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtoyoso, Patih Jelantik, Sultan Nuku, Sultan Ba'abullah, dan lain-lainnya, yang sebelumnya tenang dan penduduknya makmur, ternyata menjadi korban keganasan bangsa kulit putih dan tidak berdaya melawannya. Antar kerabat keraton sendiri senantiasa dipecah belah, sehingga sering terjadi konflik berkepanjangan dalam memperebutkan kekuasaan dan terjadi bunuh-membunuh. Perang suksesi di Mataram, perang Diponegoro, perang Paderi, perang Aceh dan perang-perang lainnya sengaja diciptakan oleh Belanda, agar Nusantara dapat dikuasainya.

Dalam perkembangan penjajahan sampai ratusan tahun lamanya, dengan segala ulahnya, bangsa kulit putih menciptakan bumerang sendiri. Secara tidak sengaja dalam menciptakan masyarakat sistem Barat, justru menimbulkan semangat nasionalisme pada setiap lingkungan yang dijajahnya. Dari kecongkakannya sendiri, bangsa penjajah menumbuhkan perasaan antipati dari penduduk terjajah, khususnya di Indonesia timbullah gerakan-gerakan rakyat, yang sadar akan harga diri dan martabatnya. Kesadaran ini dilandasi oleh kerinduan terhadap masa silam atas kebesaran bangsanya (Sriwijaya dan

Majapahit) (Soesanto T, 1989 : 96).

Dengan bekal pendidikan Barat itu sendiri, akhirnya bangsa Indonesia mulai bangkit, untuk melawan ketidakadilan dan berdirilah gerakan-gerakan rakyat untuk melawan penjajah. Mulai berdirinya Budi Utomo dan seterusnya dan dipelopori oleh para intelektual muda, secara brilian berani menentang penjajah. Dengan semangat pantang mundur, mereka terus berjuang menegakkan keadilan, meskipun harus ditempuh dengan masuk dan keluar penjara.

Pada tanggal 27 Februari 1927 lahirlah Indonesia Muda di Solo dan anggota-anggotanya terbuka buat seluruh pemuda Indonesia. Dalam kongresnya yang ke II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 seluruh organisasi Pemuda yang tergabung dalam Indonesia Muda, pada penutupan kongres itu, bertekad bulat untuk mendengungkan suatu sumpah yang keramat dan terkenal sebagai "SUMPAH PEMUDA". Dalam kongres itu telah bisa memperoleh pengakuan yang bulat oleh semua golongan, yaitu pengakuan keinsyafan : satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, ini sebagai cermin tertanamnya cita-cita Indonesia bersatu (A.K. Pringgodigdo, 1964 : 100).

Sumpah Pemuda inilah yang merupakan puncak dari hasrat persatuan bagi bangsa Indonesia, yang dengan keyakinan mendalam dipakainya sebagai alat untuk bersatu. Sumpah Pemuda ini didengungkan pada tanggal 28 Oktober 1928 jam 23.00 di Kramat 106 Jakarta. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang didengungkan, menimbulkan hasrat dari setiap Putra Indonesia untuk menyadari akan tanah tumpah darahnya. Sang Merah Putih ditetapkan pula sebagai Bendera Kebangsaan pada waktu itu juga. Berlangsungnya Sumpah Pemuda dan dinyanyikannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, di bawah naungan Sang Merah Putih yang sedang melambai, seakan-akan memanggil Putra Putri Indonesia untuk berbakti terhadap tanah tumpah darahnya.

Adapun tokoh-tokoh konggres Pemuda adalah Sugondo Joyopuspito (Ketua Konggres), Muh. Yamin (Sekretaris Konggres yang merumuskan bunyi ikrar Pemuda), Abu Hanifah, W.R. Supratman, Sukarjo Wiryopranoto, Kuncoro Purbopranoto, M.H. Thamrin dan lain-lainnya (Moedjanto, 1988 : 57). Peristiwa tersebut penting artinya, karena memang persatuan kebangsaan Indonesia masih dalam taraf perkembangan, bahkan sampai sekarang pun pembinaan persatuan bangsa perlu diteruskan.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945

Dengan modal Sumpah Pemuda tersebut, dalam revolusi fisik selanjutnya bangsa Indonesia menambah pengalamannya dari penjajahan Jepang, yang melahirkan heroisme, patriotisme dan mempertebal nasionalisme. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman telah tiba dari Dalat tanpa mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Menyerahnya Jepang ini telah diketahui oleh para Pemuda, terutama Sultan Syahrir.

Para Pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamakan kemerdekaan, tetapi ditolak karena Soekarno-Hatta masih menanti persidangan PPKI yang direncanakan tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945 para pemuda mengadakan rapat di Laboratorium Microbiologi Pengangsaan Timur dipimpin Craerul Saleh. Rapat memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memutuskan ikatannya dengan Jepang dan segera memproklamakan kemerdekaan. Karena Soekarno-Hatta tidak setuju, maka mereka dibawa oleh Syodan Co Singgih pada tanggal 16 Agustus 1945 waktu subuh dan menuju ke Rengasdengklok, tetapi atas jaminan Ahmad Subarjo, maka Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta. Soekarno-Hatta berjanji, bahwa keesokan harinya sanggup memproklamakan kemerdekaan (Hatta M, 1970 : 51).

Kembalinya ke Jakarta terus ke rumah Laksamana Maeda yang simpati kepada kejujuran rakyat Indonesia. Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama berkumpul di rumahnya untuk mengadakan pembicaraan. Pada malam itu Soekarno-Hatta mendapat keterangan dari Somu Buco bahwa Jepang sudah menyerah, sehingga tidak dapat mengijinkan adanya Proklamasi Kemerdekaan. Jadi Soekarno-Hatta harus mengambil ketegasan untuk segera memproklamkan kemerdekaan, lepas dari Jepang.

Di rumah Maeda tanggal 16 Agustus 1945 malam sudah banyak berkumpul para pemuda dan sebagian anggota PPKI, untuk segera menyusun teks proklamasi. Teks disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, yang disaksikan oleh Suyuti Melik, Sukarni, B.M. Diah dan Sudiro. Setelah teks ditulis oleh Bung Karno, kemudian dibacakan dihadapan pada tokoh pemuda dan pemimpin yang hadir di ruang depan. Setelah disetujui bahwa yang menandatangani Soekarno-Hatta, maka teks diketik oleh Suyuti Melik. Usul tersebut datang dari pemuda Sukarni, yang untuk menghemat tempat dan menyingkat waktu, juga untuk memberikan kepercayaan kepada Soekarno-Hatta (Moh.Hatta, 1970 : 53).

Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945 tepat jam 10.00 pagi teks dibacakan oleh Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Setelah itu dikibarkan bendera Merah Putih Suhud dan Latif Hendraningrat. Bendera tersebut hasil jahitan ibu Fatmawati Sukarno. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, sampailah perjuangan bangsa Indonesia ke titik kulminasi, yang berarti perjuangan sampai ke puncaknya. Proklamasi Kemerdekaan ini mencakup kedaulatan RI, meliputi wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai ke Merauke (Hatta M, 1970 : 57).

Perjuangan ini berhasil mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia ke "JEMBATAN EMAS KEMERDEKAAN". Akibatnya adalah :

Pertama, segenap rakyat dari pusat sampai pelosok-pelosok menanggapi proklamasi

dengan penuh gembira. Pekik merdeka terdengar di seluruh tanah air.

Ke dua, pemuda-pemuda yang bekerja pada jawatan-jawatan segera mengambil alih pimpinan dari tangan Jepang.

Ke tiga, pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, KNIL segera membentuk Barisan Keamanan Rakyat (BKR). BKR pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ke empat, semua hak milik Jepang di mana-mana dinyatakan menjadi milik RI.

Ke lima, di mana-mana terpancang spanduk kemerdekaan dan berisi ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk mengusir segala bentuk penjajahan, di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat.

Ke enam, di desa-desa dibentuk OKD yang menyediakan diri guna membantu pemerintah RI, untuk mengusir penjajah dan mengamankan negara dari Sabang sampai ke Merauke.

Makna Proklamasi Kemerdekaan adalah kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Kemerdekaan sebenarnya bukan merupakan tujuan pokok, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai "masyarakat adil dan makmur". Kalimat pendek dalam teks Proklamasi tersebut, telah menggema dalam lima benua dan tujuh lautan (Supardo, 1960 : 68).

Arti dari Proklamasi Kemerdekaan, adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletusnya revolusi yang terus bergolak, pernyataan kematangan pikiran bangsa Indonesia, dasar dan dorongan revolusi untuk menuntut kebenaran dan keadilan, serta titik tolak dari pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (Cindy Adams, 1966 : 340). Maju terus pantang mundur : onward no retreat.



B. Wawasan Nusantara

a. Sebagai pengikat kesatuan wilayah Sabang-Merauke

Luas kepulauan Nusantara beserta laut-lautnya hampir sebesar Eropa dan letak Indonesia dalam posisi silang antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah yang dimiliki sebagian besar terdiri atas laut-lautan yang kaya akan potensi tambang-tambanganya. Potensi nasionalnya memiliki aspek-aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan kekayaan alamnya yang tiada taranya, menyebabkan berbagai bangsa Barat tergiur ingin menguasai negara kita, sehingga berabad-abad lamanya negara kita dijajah oleh bangsa kulit putih. Mereka menetralkan peraturan perundangan atau hukum di tanah air kita, yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita. Salah satunya adalah hukum laut buatan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Teritoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie 1939*, yang menyatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil, diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau di Indonesia. Peraturan itu menyebabkan adanya lautan bebas di antara pulau-pulau yang ada, sehingga sangat membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

Untuk mengatasi kesulitan itu, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang kemudian dikenal dengan sebutan "Deklarasi Juanda". Dalam deklarasi ini ditetapkan, bahwa lebar laut wilayah Indonesia sejauh 12 mil, diukur dari garis-garis dasar yaitu yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau yang paling luar. Alasan Indonesia mengeluarkan keputusan ini antara lain untuk melindungi kekayaan negara Indonesia dan demi keselamatan negara, sehubungan dengan perkembangan jaman modern sekarang, dalam penggunaan senjata canggih

(Nugroho N, 1981 : 121).

Dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda tersebut, berarti tidak lagi terdapat lautan bebas di antara pulau-pulau di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 13.667, dengan laut sebagai penghubungnya. Deklarasi Juanda menetapkan batas perairan yang meliputi seluruh wilayah NKRI dari ujung utara pulau Sumatera (Aceh) sampai ke perbatasan dengan Irian Timur. Deklarasi Juanda ini kemudian melahirkan Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang terhadap perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pada prinsipnya Wawasan Nusantara harus diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan internasional, sebab ia mempunyai peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai tujuan pembangunan nasional.

Perjuangan yang ditempuh bangsa Indonesia dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut yang diadakan oleh PBB (UNCLOS), di Jenewa pada tahun 1958. Kemudian disusul dengan Konferensi Hukum Laut, yang membicarakan masalah Indonesia pada tahun 1960, di Jenewa juga. Karena perjuangan di forum internasional belum berhasil, maka pemerintah menciptakan landasan hukum yang kuat bagi Deklarasi Juanda pada tanggal 18 Pebruari, yang berhasil menelorkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 1960, tentang perairan Indonesia, yang isinya adalah :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar.
2. Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
3. Jalur laut wilayah laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis-garis lurus nya.
4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelagic waters).
Negara berdaulat atas perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini,

dijamin selama tidak merugikan kepentingan dan mengganggu keamanan dan ketertiban. (Budiarto M, 1980 : 35).

Dari pernyataan tersebut di atas mempunyai akibat yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, yaitu :

1. Jalur laut wilayah yang terjadi adalah melingkari seluruh kepulauan Indonesia.
2. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal mengubah statusnya dari laut lepas menjadi perairan pedalaman.
3. Wilayah Negara RI yang semula luasnya 2.027.087 km² (daratan), bertambah luas menjadi kurang lebih 5.193.250 km² terdiri dari daratan dan lautan (Budiarto M, 1980 : 35).

b. Sebagai batas landasan kontinental wilayah RI

Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landasan wilayah RI sebagai usaha untuk meningkatkan perjuangan adanya gagasan Wawasan Nusantara sebagai berikut :

1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah hak milik eksklusif negara RI.
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan.
3. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landasan kontinen Indonesia adalah garis yang ditarik dari tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik luar wilayah negara tetangga.
4. Claim di atas tidak mempengaruhi sifat serta perairan atas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya (Budiarto M, 1980 : 36).

Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan RI, pemerintah segera memikirkan batas wilayah dengan Papua New Guinea yang pada waktu itu masih menjadi wilayah Australia. Ke dua negara segera mengadakan pendekatan dan menghasilkan apa yang disebut : Joint Survei Indonesia Australia (Misi Cendrawasih) tahun 1965-1967. Hasil misi tersebut adalah penetapan batas-batas dasar laut tertentu. Persetujuan ini ditanda tangani pada tanggal 18 Mei 1971 dan diperkuat lagi dengan perjanjian mengenai batas dasar laut tersebut pada tanggal 9 Oktober 1972.

Walaupun sudah tercapai kesepakatan mengenai beberapa titik-titik perbatasan ke dua negara, tetapi masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, sehingga sesuai dengan Memorandum of Understanding 1972, yang berlangsung dari tanggal 22-26 Januari 1973, dihasilkan garis-garis batas wilayah darat, garis-garis batas wilayah laut serta garis dasar laut di selatan Papua. Hal ini dapat dilihat dalam UU RI No. 6 tahun 1973. Perundingan bilateral Indonesia-Malaysia berlangsung di Kualalumpur tanggal 17 Maret 1970. UU RI No. 2 tahun 1971.

Setelah tercapai kesepakatan antara Indonesia-Australia, Papu New Guinea, Indonesia-Malaysia, kemudian dilakukan Republik Singapura pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta. Isi pokok perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di selat Singapura yang sempit (kurang dari 15 mil laut), adalah suatu garis yang terdiri atas garis-garis lurus yang ditarik dari titik-titik yang koordinatnya tercantum dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini disahkan dengan UU No.7 tahun 1973.

Untuk mengamankan kepentingan rakyat Indonesia dalam landas kontinen, yang berbatasan dengan negara dan demi kepastian hukum Indonesia, maka pada tanggal 17 Pebruari 1969 telah dikeluarkan pengumuman pemerintah tentang Landas Kontinen

Indonesia yang dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1973. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional dilanjutkan dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut PBB III di Caracas pada bulan Juli 1974 dan sudah berhasil tetapi belum sepenuhnya. Usaha Indonesia dalam berapa tahap, makin lama menjadi kenyataan, meskipun sering mendapatkan kecurigaan dari negara lain.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas claim laut sebagai aspek Wawasan Nusantara, telah menunjukkan keberhasilannya pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut IV, yang diselenggarakan di Mabes PBB New York pada tanggal 8 Maret sampai dengan 30 April 1982. Dalam konferensi ini telah disetujui sebuah Rancangan Konvensi Hukum Laut yang baru, yang terdapat di dalam rumusan wilayah Nusantara sesuai dengan konsep kenusantaraan Indonesia. Akhirnya konvensi Hukum Laut yang baru telah ditandatangani wakil-wakil dari kurang lebih 130 negara dalam konferensi di teluk Montego, Kingstone, Jamaika pada tanggal 6-10 Desember 1982.

Di dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut, dijamin sesuai dengan hukum internasional. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dikukuhkan dengan UU NO. 5 tahun 1983, setahun setelah ditatangannya Hukum Laut Internasional di Jamaica oleh hampir seluruh peserta, kecuali Amerika dan tiga negara lainnya.

Dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB yang baru tersebut, berarti kemenangan besar bagi perjuangan Indonesia di bidang hukum internasional. Dengan diakuiya Wawasan Nusantara itu berarti pula pengakuan internasional terhadap Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai satu kesatuan yang utuh wilayahnya, dengan pulau-pulau dengan gugusan pulau-pulau di dalamnya yang tak

terpisahkan (Budiarto M, 1980 : 38).

Untuk menetapkan batas-batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, diadakan serangkaian perundingan yang menghasilkan perjanjian-perjanjian garis batas landas dengan Malaysia, Australia dan negara tetangga yang lain. Dari keberhasilan memperjuangkan langasan kontinen ini, berarti konsep historis yang telah dirintis oleh kerakaan Sriwijaya dan Majapahit, sungguh-sungguh dapat diwujudkan oleh generasi Republikan, yang telah lama merindukan kejayaan bangsa (Budiarto M, 1980 : 41).

Wawasan Nusantara yang dilahirkan melalui Deklarasi Juanda sejak tahun 1957 tersebut merupakan faktor penyebab dicanangkannya Tri Komando Rakyat, karena adanya cita-cita untuk membulatkan wilayah Indonesia selalu mendapat hambatan dari Belanda. Dari sinilah semangat heroisme, patriotisme dan nasionalisme berkembang menjadi gerakan yang dahsyat, yang dapat menghasilkan karya pengabdian setiap putra Indonesia untuk menghancurkan penjajah angkara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

PERJUANGAN DIPLOMASI SEBELUM TRI KOMANDO RAKYAT

A. Konferensi Meja Bundar (KMB) :

Konferensi ini diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 Nopember 1949. Sesudah bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam Konferensi Antar Indonesia, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi KMB. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di lain pihak mengumumkan perintah penghentian tembak-tembakan. Perintah itu berlaku mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera.

Dari perintah penghentian tembak-tembakan sebagai syarat bagi ke dua belah pihak untuk terselenggaranya KMB ini, merupakan titik awal diakhirinya konflik bersenjata antara ke dua pihak. Setelah Jendral Sudirman berhasil memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata, kemudian disusul oleh perintah Jendral Lovink kepada tentara Belanda, sehingga tamatlah permusuhan tersebut.

Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah disusun delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri KMB, yang terdiri Drs. Moh. Hatta sebagai ketua dan anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kol. T.B. Simatupang dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Borneo Tenggara.

Dalam KMB didapatkan suatu ketentuan yang paling penting yaitu Piagam Penyerahan Kedaulatan, yang oleh Indonesia diartikan sebagai Piagam Pengakuan Kedaulatan, karena kemerdekaan telah diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu KMB menghasilkan naskah-naskah persetujuan yang lengkap, mengatur hubungan antara Indonesia (RI dan BFO) dan Belanda yang pada pokoknya terbagi menjadi dua bagian yaitu induk dan anak persetujuan (Moedjanto, 1988 : 57).

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dibuka di Den Haag, negeri Belanda. Konferensi berlangsung sampai tanggal 2 Nopember 1949 dengan hasil sebagai berikut :

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yang akan diserahkan kepada RIS akhir bulan Desember 1949.
2. Status kemerdekaan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Akan dibentuk UNI Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
4. RIS harus mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak Konsesi serta ijin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942 (Moedjanto, 1988 : 57).

Tentang status Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan, mengakibatkan permasalahan yang sangat rumit. Belanda selalu mengulur waktu untuk memperkuat kedudukannya di Irian Barat, dengan menambah kekuatan militernya, sedangkan bagi Indonesia yang sudah lebih sepuluh tahun menanti, sudah kehilangan kesabarannya. Akhirnya RI memutuskan konfrontasi total, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa RI juga punya harga diri.

Perlu diketahui bahwa status Irian Barat (NIEUW GUINEA) disebutkan tersendiri dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat dicapai, sehingga soal itu masih menjadi pokok pertikaian.
- b. Disebabkan keharusan KMB diakhiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949.
- c. Mengingat faktor penting-penting yang harus diperhatikan pada pemecahan masalah Irian itu.
- d. Mengingat singkatnya penyelidikan yang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal yang bersangkutan dengan masalah Irian itu.
- e. Mengingat sukarnya tugas kewajiban yang akan dihadapi dengan segera oleh peserta UNI, dan
- f. Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas, agar semua perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari dapat diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan, bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada KMB, masalah kedudukan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dan Kerajaan Nederland (Samawi, 1970 : 99).

B. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 26 Maret 1951).

Setelah adanya kesepakatan dari seluruh bangsa dan negara-negara bagian RIS, maka RIS dibubarkan dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan. Kemudian dibentuk kabinet pertama dengan perdana menterinya seorang ketua Masyumi bernama Moh. Natsir. Mula-mula ia mengalami kesulitan karena ajakan

untuk berkoalisi dengan PNI mendapatkan jalan buntu, maka ia terpaksa meninggalkan PNI.

Para Menteri Kabinet Natsir rata-rata ahli dalam bidang administrasi, sehingga setiap departemen memiliki program yang jelas dan rapi. Kabinet Natsir tetap juga mendapatkan kritikan dari partai oposisi yang dipelopori PNI, bahkan dari partai Masyumi yang dipimpinnya, khususnya dari kelompok Sukiman. Moh. Natsir menyatakan bahwa kabinetnya merupakan kabinet peralihan dan kabinet kerja, yang akan mengakhiri jabatannya setelah pemilu selesai. Rencana Pemilu akan diadakan pada tahun 1951.

Banyaknya kritikan yang dilontarkan kepada kabinetnya, maka perlu diadakan pemungutan suara di parlemen, untuk menentukan bahwa kabinetnya masih memiliki kredibilitas atau tidak. Hasil pemungutan suara ternyata 118 suara mendukung dan 73 menentang, tetapi betapapun masih mendapat dukungan yang besar, hubungannya dengan parlemen sudah kurang serasi.

Program Kabinet Natsir terdiri dari 7 pasal, yang intinya dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu singkat.
2. Memajukan perekonomian, kesehatan dan kecerdasan rakyat.
3. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
4. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Jaya dalam tahun ini juga (1950).
5. Memulihkan keamanan dan ketertiban (Moedjanto, 1988 : 81).

Persoalan yang lebih berat dari pemerintahan Kabinet Natsir adalah masalah Irian Barat dan pengaturan pemerintahan daerah. Menurut Piagam Pengakuan Kedaulatan, masalah Irian Barat akan dibicarakan dan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah persetujuan KMB ditandatangani. Menurut penafsiran pihak RI yang dimaksud dengan

ketentuan itu, bahwa pihak Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada RI, satu tahun sesudah 27 Desember 1949. Dengan berpegang kepada isi Piagam Penyerahan Kedaulatan, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari penyelesaiannya (Nugroho N, 1986 : 85).

Pada berbagai pertemuan antara RI dengan Belanda, serta perkembangan di negeri Belanda pada awal tahun 1950 menunjukkan tanda-tanda, bahwa penafsiran Indonesia keliru. Komite bersama untuk India Barat telah dibentuk antara Belanda dengan RIS pada bulan Maret 1950 tetapi gagal menghasilkan kesepakatan. Di negeri Belanda sendiri terdapat pandangan yang berubah setelah pulangnya para pegawai dan tentara Belanda yang mengalami penderitaan selama revolusi, menyarankan agar pemerintah Belanda jangan banyak mengalah kepada RI.

Perubahan sepihak dari RIS ke Negara Kesatuan RI, merupakan gejala tipu muslihat RI kepada Belanda untuk mengingkari KMB. Kejadian-kejadian di Indonesia berupa pemogokan-pemogokan meluas tak terkendali. Kejadian ini dinilai oleh pihak Belanda sebagai pertanda ketidak mampuan bangsa Indonesia untuk mengatur dirinya sendiri.

Sebenarnya banyak pengusaha di Indonesia (orang-orang Belanda) demi modal mereka, mendesak supaya Irian Jaya diserahkan kepada RI saja. Pendapat umum di negeri Belanda lebih banyak membenci RI, sehingga pemerintah Belanda segera memperkuat kedudukan militernya di Irian Jaya, dan mengalirkan modalnya untuk meningkatkan daya tahan ekonominya di sana.

Kabinet Natsir menjalankan politik perjuangan lunak dengan mengharapkan bantuan internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Keinginan Kabinet Natsir adalah agar Irian Barat dapat dipersatukan dengan ibarat "bisa menangkap ikan tanpa

mengeruhkan airnya". Sikap Kabinet Natsir mencerminkan sikap golongan administrator yang berkebalikan dengan sikap penganjur persatuan, yang dipelopori oleh Presiden Sukarno. Muh. Yamin adalah pendukung setia Sukarno. Cara memperjuangkan golongan penganjur persatuan adalah cara revolusioner seperti yang dilakukan dalam masa revolusi dahulu.

Perbedaan politik Kabinet dengan Presiden menyebabkan makin dekatnya Presiden kepada golongan oposisi (PNI). Sebenarnya menurut sistim politik yang berlaku pada waktu itu, Presiden harus bernada sama dengan Pemerintah, tetapi jika dengan jiwa revolusioner serta prestisya menghendaki Pemerintah yang tunduk kepadanya. Dengan sikapnya itu Presiden telah meniupkan angin yang menguntungkan oposisi. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh, bukan karena soal Irian Jaya, melainkan soal pengaturan daerah (Moedjanto, 1988 : 83).

Akibat gagalnya diplomasi yang telah ditempuh, maka Kabinet Natsir, mengeluarkan pengumuman yang berbunyi :

1. Republik Indonesia tetap mempertahankan tuntutannya atas Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
2. Status Irian Barat yang menurut KMB seharusnya dirundingkan satu tahun kemudian antara RI dengan Belanda, mulai sa'at itu harus dilakukan melalui forum internasional yaitu PBB (Mokoginta, 1964 : 149).

C. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 22 Pebruari 1952)

Kabinet Sukiman meneruskan program-program kabinet terdahulu, termasuk program Kabinet Natsir dan terdiri dari 7 pasal. Yang ada hubungannya dengan pemulihan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan persetujuan KMB, mengalami perubahan skala

prioritas dan lebih memperoleh penegasannya. Dalam pemerintahannya, Kabinet Sukiman memperoleh dukungan luas dari Parlemen, tetapi juga banyak hal yang mempersulit kedudukannya, khususnya dari partainya sendiri yang dipelopori oleh Natsir.

Adanya bermacam-macam gejolak, baik di bidang ekonomi politik dan keamanan ini, maka program paling penting untuk merealisasikan konsolidasi nasional dengan usaha menyatukan Irian Barat ke dalam wilayah RI, akhirnya menjadi terabaikan. Adanya Piagam Penyerahan Kedaulatan yang telah berlangsung selama 2 tahun, ternyata persoalan Irian Barat yang seharusnya dapat diselesaikan setahun yang lalu menjadi berlarut-larut. Dipandang dari kepentingan dalam negeri, mungkin karena pemerintahan Kabinet Sukiman ini baru disibukkan oleh berbagai masalah yang lebih prinsipil, namun dilihat dari segi politik luar negeri, Kabinet Sukiman tampak bergandengan erat dengan Amerika Serikat. Kecenderungan ini nampak sejak dimulainya penanda tangan perjanjian perdamaian dengan Jepang di San Fransisco tanggal 7 September 1951, yang naskahnya dicanangkan oleh Amerika (Moedjanto, 1988 : 85).

Delegasi Indonesia di bawah pimpinan Ahmad Subarjo (Menlu), berhasil memasukkan ketentuan dalam naskah perjanjian itu, agar di kemudian hari antara Jepang dengan negara-negara yang pernah diduduki, diadakan perjanjian bilateral tentang pampasan perang yang adil dan wajar. Indonesia juga memperoleh persetujuan dari Amerika tentang bantuan ekonomi dan tehnik seharga 50 juta dolar Amerika.

Pada jaman pemerintahan Kabinet Sukiman, Amerika berkenan memberikan keistimewaan kepada Indonesia, padahal Amerika biasanya tidak mau memberi bantuan kepada negara-negara yang mengadakan hubungan dagang dengan RRC. Hubungan antara RI dengan Amerika pada waktu itu tampak mesra setelah ditanda tangannya Mutual Security Act (UU kerja sama keamanan) pada tanggal 15 Januari 1952. Atas dasar

persetujuan tersebut, RI akan menerima bantuan dari Amerika dalam bentuk ekonomi dan militer.

Kabinet ini juga berumur singkat, karena masalah pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer atas dasar ikatan dari MSA. Peristiwa ini ditafsirkan, bahwa Kabinet Sukiman telah memasukkan Indonesia ke Blok Barat. DPR menggugat kebijaksanaan itu dan jatuhnya Kabinet Sukiman, yang selama masa 2 tahun sesudah RIS bubar, sudah dua kali pergantian Kabinet, rata-rata program yang telah dibuat tidak sempat dilaksanakan (Nugroho N, 1981 : 129).

Dari bantuan Amerika melalui MSA ini dapat ditafsirkan, bahwa Kabinet Sukiman sengaja dijadikan alat oleh Belanda untuk mengulur waktu, atau disengaja mengesampingkan masalah Irian Barat, karena Amerika adalah sekutu Belanda. Belanda merasa beruntung bahwa bantuan atas dasar MSA tersebut dapat melemahkan tuntutan Indonesia atas Irian. Apabila memang demikian, Kabinet Sukiman berarti mengkhianati rakyatnya sendiri, yang membiarkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, dengan dalih anti komunis.

D. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dari PNI-Masyumi-PSI dan personilnya terdiri dari tokoh-tokoh muda yang pandangannya sesuai dengan pandangan golongan administrator. Tanggapan umum atas terbentuknya Kabinet Wilopo baik sekali, karena dinilai sebagai Kabinet yang terdiri dari tokoh-tokoh yang tepat menduduki jabatannya. Kabinet ini memberikan harapan yang baik akan keberhasilan dalam menyelenggarakan program-programnya (Moedjanto, 1988 : 87).

Program Kabinet ini terutama ditujukan kepada persiapan usaha menghadapi Pemilu dan kemakmuran yang ditekankan kepada kesejahteraan rakyat dan keamanan. Program luar negeri ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat dan melaksanakan politik bebas aktif menuju perdamaian dunia. Masalah yang berat masa Kabinet Wilopo adalah gejala timbulnya separatisme daerah dan Angkatan Perang. Gejala separatisme timbul karena kekecewaan terhadap imbangannya alokasi keuangan antara pusat dan daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat lebih besar dari pada yang dikembalikan ke daerah (Nugroho N, 1981 : 130).

Kabinet Wilopo memprioritaskan perjuangan Irian Barat, ternyata jatuh pula, oleh karena pada waktu itu sarat gejolak dalam berbagai bidang. Yang paling menonjol adalah konflik intern AD. Konflik ini mempunyai pengaruh baik, karena perhatian ke arah Pemilu yang akan mengakhiri hidup Parlemen sementara, menjadi sangat besar (Moedjanto, 1988 : 89).

E. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

Setelah melalui masa krisis 58 hari lamanya, maka terbentuklah Kabinet Ali Sastroamijoyo yang merupakan kabinet terakhir, sebelum pelaksanaan Pemilu. Kabinet ini didukung oleh PNI dan NU, sedangkan Masyumi dan PSI berdiri sebagai partai oposisi. PKI pada waktu itu sudah makin besar dan siap mengikuti pemilihan umum, sehingga dapat memperkuat kedudukan Kabinet Ali Sastroamijoyo, karena menginginkan pengaruh yang besar dari rakyat dan pemerintahan Kabinet Ali.

Kabinet ini tetap memperjuangkan kembalinya Irian Barat melalui diplomasi dan berusaha menarik perhatian internasional, di dalam Sidang Majelis Umum ke 9 PBB (tahun 1954). Hasilnya pada waktu itu memang masih sangat mengecewakan, karena

kecuali masih banyak negara-negara ke tiga yang belum merdeka, negara-negara Blok Barat masih sangat dominan pengaruhnya terhadap PBB. Dalam persidangan Majelis Umum ke 9 PBB ini, masalah Irian Barat tidak dapat memperoleh suara lebih dari dua pertiga, yang berarti masalah Irian Barat tidak dapat (gagal) dibicarakan dalam forum ini (Mokoginta, 1964 : 149).

Usaha mempercepat kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI memang menjadi prioritas politik luar negeri Kabinet Ali dan tampak jelas pada programnya yang terdiri dari 4 pasal pokok sebagai berikut :

1. Dalam negeri, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta pemilihan umum.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Luar negeri, bebas aktif dan peninjauan kembali hasil KMB.
4. Penyelesaian pertikaian politik (Moedjanto, 1988 : 90)

Dipandang dari politik luar negeri yang bebas aktif Kabinet Ali-Wongso ini boleh dikatakan yang paling berhasil karena dalam situasi yang rumit, berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-15 April 1955. Konferensi ini dipelopori oleh lima negara yaitu Indonesia, India, Srilangka, Pakistan dan Burma (Myanmar). Ke lima negara ini sering disebut negara-negara Colombo, karena sebelumnya mereka adalah anggota Konferensi Colombo yang mengadakan kerja sama di bidang sosial, ekonomi dan budaya dan diselenggarakan pada bulan Maret-April 1954. Kemudian rencana tanggal dan tempat penyelenggaraan, serta jumlah yang diundang dibicarakan dalam Konferensi Bogor pada akhir bulan Desember 1954.

Negera-negara Asia-Afrika yang diundang sebanyak 29 negara, yang telah merdeka ada 23 dan sisanya dalam status hampir merdeka. Waktu penyelenggaraan konferensi memang sangat tepat, karena dunia sedang diliputi oleh ketegangan perang dingin antara

Blok Barat dengan Blok Timur. Berbagai-bagai bangsa sedang memperjuangkan atau menyempurnakan kemerdekaannya, atau berjuang untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Bagi Indonesia konferensi ini merupakan keuntungan yang besar, karena untuk selanjutnya perjuangan merebut Irian Barat mendapatkan dukungan yang kuat dari negara-negara peserta. KAA sangat berarti bagi Indonesia karena membeikan dukungan utama bagi pembebasan wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda (Nugroho N, 1981 : 147).

Keberhasilan dalam Konferensi Asia-Afrika ini ternyata tidak dapat diimbangi oleh stabilitas ekonomi, bahkan inflasi sudah menunjukkan gejala yang membahayakan, Keadaan ini makin diperparah oleh adanya konflik antara PNI dengan NU, sehingga NU menarik diri dari Kabinet Ali (20 Juli 1955). Gejala di berbagai bidang yang senantiasa menggoyang Kabinet Ali ini, menyebabkan Kabinet Ali jatuh dan menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Jatuhnya Kabinet Ali merupakan akibat dari parahnya kondisi dan situasi yang kompleks, baik dalam bidang keamanan, politik, ekonomi dan hukum yang sangat menyulitkan pemerintahannya. Usaha untuk mengadakan Pemilu dan pembebasan Irian Barat secepatnya gagal total karena kurangnya kesadaran nasional yang tinggi, akibat pertikaian partai-partai politik yang semakin tidak terkendali, sebagai akibat digunakannya sistem liberal.

F. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

Pembentukan kabinet ini melalui tawar-menawar, mengenai kedudukan menteri yang memakan waktu agak lama, sehingga setelah kabinet ini terbentuk, kemudian mendapatkan sindiran sebagai "Kabinet Dagang Sapi". Karena Presiden Sukarno baru menunaikan ibadah Haji, maka wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk tiga orang formatir

kabinet yaitu Sukiman, Wilopo dan Asa'at, tetapi gagal membentuk kabinet, sehingga wakil Presiden menunjuk orang lain yaitu Burhanuddin Harahap, untuk membentuk Kabinet.

Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk dengan perhatian utama dicurahkan untuk memerangi inflasi dan hasilnya cukup memuaskan, harga barang-barang import cukup murah (Moedjanto, 1988 : 93). Hasil yang menonjol pada kabinet ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang pertama bagi Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante (Nugroho N, 1981 : 94).

Dalam perjuangannya menghadapi Belanda, Kabinet Burhanuddin Harahap juga mengalami kegagalan, karena perundingan antara Menlu Anak Agung Gede Agung dengan Menlu Luns di Den Haag dan Jeneva antara Desember 1955 dan Pebruari 1956, mengalami jalan buntu. Indonesia tidak berhasil membatalkan UNI Indonesia-Belanda, dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan dan tentang masalah Irian Barat yang telah berlarut-larut. Kabinet Burhanuddin dengan beraninya secara sepihak (unilateral), membubarkan UNI Indonesia-Belanda pada 13 Pebruari 1956 dan merencanakan tindakan lanjutan mengenai persetujuan KMB.

Khusus dalam masalah Irian Barat, Kabinet Burhanuddin Harahap pernah berusaha membawanya ke dalam Sidang Umum PBB yang 10. Dalam sidang ini Indonesia tidak memperoleh hasil yang memuaskan sebab PBB hanya memberi harapan agar perundingan Indonesia-Belanda di Jeneva dapat berhasil. Belanda mau mengadakan perundingan, tetapi dengan syarat yang memberatkan Indonesia dan kurang jelas bagi RI, yang antara lain berbunyi : "Pembicaraan tentang beberapa soal mengenai Irian Barat dengan pengertian, bahwa perihal kedaulatan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya (Mokoginta

AJ, 1964 : 149). Dengan kata-kata ini terlihat bahwa tidak menjamin penyerahan atas Irian Barat kepada RI.

Kabinet Burhanuddin Harahap masih menginginkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi, sehingga pihak RI mau menyetujui syarat-syarat yang diajukan Belanda, maka diadakan perundingan Jeneva. Perundingan ini gagal, menurut laporan pertanggung jawaban Menteri Luar Negeri RI, kepada DPR pada tanggal 22 Pebruari 1956 (Baharuddin Lopa, 1962 : 57). Dengan gagalnya perundingan di Jeneva ini, kemudian Indonesia membubarkan UNI Indonesia-Belanda secara sepihak yang berlaku mulai tanggal 15 Pebruari 1956, seperti telah disebutkan di depan. Dari kegigihan usaha Kabinet Burhanuddin untuk mengembalikan Irian Barat juga mengalami kegagalan, karena banyak gejolak yang timbul dari dalam negeri sendiri. Pemikiran yang terpecah belah ke segala perhatian, akhirnya dapat membuyarkan konsentrasi perundingan itu sendiri.

G. Kabinet Ali II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan Kabinet Koalisi, di mana tiga partai besar PNI, Masyumi dan NU ikut serta dalam kabinet, sedangkan PKI masih belum diajak masuk dalam kabinet, karena masih banyak penentangannya. Dengan terbentuknya Kabinet Ali yang kedua ini mendapatkan dukungan luas dan memberi harapan untuk dapat menjalankan programnya yang terperinci. Dengan melihat komposisi anggota-anggotanya yang belum menonjol dengan muka baru, menimbulkan keragu-raguan banyak pihak, apakah kabinet ini akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Program-program Kabinet Ali II ini mirip juga dengan program-program kabinet yang terdahulu, namun lebih terinci, untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, yaitu :

1. Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar.

Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian yang dihasilkan KMB secara unilateral maupun material dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menanggung akibatnya.

2. Perjuangan untuk menyatukan Irian Barat dengan tegas.

Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia dengan tegas atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme dan imperialisme di dunia internasional. Kemudian membentuk propinsi Irian Barat, dengan ibu kota di Soa-Sio, Ternate.

3. Luar negeri :

Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Disamping itu meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung.

4. Dalam negeri :

Memulihkan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri pertanian, perhubungan, pendidikan, pertahanan dan lain sebagainya (Nugroho N, 1981 : 97).

Pembatalan KMB secara sepihak sudah dirintis oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu berupa pembatalan UNI Indonesia-Belanda. Selanjutnya Kabinet Ali II membatalkan seluruh perjanjian KMB sejak 3 Mei 1956 dan berbagai hutang RI sebagai akibat KMB, dibatalkan juga. Seandainya Belanda mau memenuhi tuntutan RI untuk menyerahkan Irian Barat, hubungan RI-Belanda kiranya tidak akan memburuk (Moedjanto, 1988 : 96).

Dengan pembubaran perjanjian KMB secara sepihak oleh Indonesia, dengan menggunakan Undang-Undang No. 13 tahun 1956, maka Indonesia kembali menggunakan dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD'45 ini. Dalam proklamasi terkandung makna, bahwa kemerdekaan RI mencakup seluruh kepulauan Nusantara bekas jajahan Belanda. Hubungan selanjutnya antara Indonesia dengan Belanda, adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Kepentingan Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia (Nugroho N, 1981 : 99).

Kabinet Ali II ingin sekali dapat menyelesaikan masalah Irian Barat secepatnya untuk membalas tindakan Belanda yang memasukkan Irian Barat ke wilayah kerajaan Belanda, dengan persetujuan parlemen pada bulan Agustus 1952. Sebenarnya tindakan Belanda ini, justru mendorong Kabinet Ali menghapuskan misi militer Belanda pada bulan April 1953. Dengan tindakan menghapuskan misi militer Belanda ini, maka pada era Kabinet Ali II, hubungan Indonesia-Belanda makin memburuk, karena banyak orang Belanda membantu pemberontakan di Indonesia.

Sesuai dengan programnya, Kabinet Ali II membentuk propinsi Irian Barat yang ibu kotanya berkedudukan di Soa-Sio. Peresmian pembentukan propinsi Irian Barat, dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1956. Propinsi ini meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani serta Wasile di Maluku Utara. Sebagai Gubernur Irian Barat yang pertama, pada bulan September 1956 diangkat Sultan Tidore, yaitu Zainal Abidin Syah. Di dalam sejarah tercatat, bahwa sampai dengan akhir abad ke 19, Irian berada di bawah kekuasaan Sultan Tidore.

Pembentukan propinsi Irian Barat ini, mendapat reaksi dari Belanda, dengan minta bantuan kepada negara-negara Barat tetapi tidak mendapat tanggapan seperti yang diharapkan. Setelah gagal mendapat bantuan, maka Belanda berusaha agar masalah Irian Barat diselesaikan secara yuridis melalui Mahkamah Internasional. Usaha Belanda ini ditolak oleh Indonesia, dengan pertimbangan bila masalah Irian Barat diselesaikan secara yuridis saja melalui Mahkamah Internasional, besar kemungkinan akan lebih mempersulit penyelesaiannya. Kemungkinan putusan Mahkamah Internasional hanya akan melahirkan putusan yang bersifat yuridis, sedangkan persoalannya merupakan persoalan politik (Baharuddin Lopa, 1962 : 68).

Kabinet Ali II terpaksa meletakkan jabatannya, karena digoncang oleh adanya pemberontakan PRRI/Permesta, yang sangat menyulitkan. Dari situasi yang gawat ini, sebelum adanya penyerahan mandat dari Ali, Presiden Sukarno pada tanggal 13 Maret 1957. Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya (SOB). Kemudian Presiden menunjuk Ir. Juanda dari non partai untuk menyusun kabinet baru.

H. Kabinet Juanda (9 April 1957)

Kabinet ini juga disebut Kabinet Karya atau Kabinet Kerja, yang mempunyai 5 program atau Panca Karya yaitu :

1. Membentuk Dewan Nasional (sesuai dengan konsepsi Presiden) dan sejak Juni 1957 membentuk Depernas.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB.
4. Perjuangan Irian Barat.
5. Mempercepat pembangunan (Moedjanto, 1988 : 104).

Kabinet ini dilantik pada tanggal 9 April 1957 dalam suasana menghadapi tantangan berat warisan Kabinet Ali II. Tantangan tersebut adalah pemberontakan separatis kedaerahan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda dan Dewan Manguni, yang nantinya akan menamakan dirinya sebagai PRRI dan Permesta.

Program ke 4 tentang usaha secepatnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah pangkuan Republik Indonesia, menjadi terhambat, bahkan Belanda sempat membantu pemberontakan-pemberontakan tersebut dengan menyelundupkan senjata-senjata modern. Dalam suasana anti Belanda yang makin meningkat, pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta, disertai pemogokan kaum buruh perusahaan-perusahaan Belanda dan pengambil alihan modal milik Belanda di Indonesia.

Setiap ada kesempatan, masalah Irian Barat ini senantiasa dibawa ke Sidang PBB selalu gagal, karena tidak mendapat dukungan yang kuat dari anggota sidang, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibicarakan dalam forum. Karena kesabaran sudah habis, maka Indonesia menjadi radikal, lebih-lebih setelah kegagalan rancangan resolusi tentang masalah Irian Barat dalam Sidang Umum ke 12 PBB pada tahun 1957. Sikap radikal Indonesia terlihat melalui jalan konfrontasi yang ditempuh dalam membebaskan Irian Barat (Nasution, 1985 : 226).

BAB IV

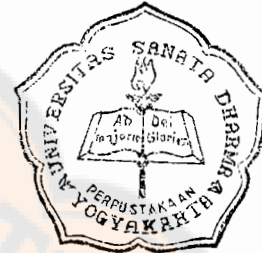
PELAKSANAAN TRI KOMANDO RAKYAT

A. Konfrontasi Ekonomi

Oleh karena upaya-upaya diplomasi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat tidak mendapatkan tanggapan dari Belanda, akhirnya pemerintah Indonesia menempuh jalan lain. Jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan konfrontasi di bidang ekonomi, untuk melumpuhkan kegiatan perekonomian Belanda, khususnya di Indonesia. Konfrontasi ini diawali dengan jalan pembatalan sepihak UNI Indonesia-Belanda pada tahun 1954 dan pembatalan hasil-hasil KMB. Kemudian dilancarkan konfrontasi ekonomi sebagai berikut :

1. Pemogokan total oleh buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Tindakan pemogokan ini ternyata berhasil melumpuhkan sirkulasi perekonomian Belanda, baik di Indonesia maupun di Eropa.
2. Pelarangan beredarnya seluruh mass media dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Bahkan buku-buku dan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Belanda dibakar dan dimusnahkan.
3. Pelarangan pesawat-pesawat milk KLM Belanda mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia. Pelarangan ini sungguh merugikan pihak Belanda, karena aset keuangan negeri Belanda banyak didapatkan dari Indonesia.
4. Pelarangan aktivitas perwakilan konsuler Belanda di Indonesia pada tanggal 2 Desember 1957. Mulai dari para pejabatnya beserta para pegawainya, diusir dan harus pulang ke negerinya.

5. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dilakukan oleh para buruh ini, kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958.
6. Pada bulan Desember 1958 diadakan nasionalisasi semua perusahaan Belanda, yang kurang lebih berjumlah 700 buah antara lain Ntherland Handle Maatschapaj, Bank Dangang Negara, perusahaan Phillip, percetakan De Uni dan lain-lainnya (Nugroho N, 1981 : 114).



B. Persiapan Perang

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintahan dan kepemimpinan dipegang langsung oleh Presiden Sukarno. Untuk mendapatkan sukses perjuangan rakyat dalam membebaskan Irian Barat, Presiden Sukarno mengadakan reluting merata di seluruh Indonesia. Ia menempatkan tokoh-tokoh revolusi 45 dan orang-orang yang bersedia bekerja keras dan sadar bahwa pengembalian wilayah Irian Barat merupakan keharusan (Baharuddin Lopa, 1962 : 75).

Ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada waktu itu Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Seluruh potensi yang ada di Indonesia, dikerahkan untuk membebaskan Irian Barat. Walaupun Indonesia sudah menempuh jalan konfrontasi, namun masih tetap mengutamakan perjuangan di bidang diplomasi.

Dalam menanggapi sikap Indonesia yang revolusioner, maka Belanda memperkuat pertahanannya di Irian Barat dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman, yang dilengkapi dengan kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam. Di samping itu Belanda terus berusaha mencari dukungan dan bantuan serta kerja sama dari negara-negara lain. Belanda juga berusaha membalas tindakan-tindakan Indonesia yang merugikan, dengan

cara memisahkan Irian Barat dari RI.

Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, yang akan menyelenggarakan "penentuan nasib sendiri" bagi rakyat Irian Barat. Tindakan Belanda ini kemudian diikuti dengan usul yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB, dalam bulan September 1961. Dalam usulannya itu Belanda menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan Irian Barat kepada PBB. Selanjutnya diminta untuk dalam jangka 16 tahun memerdekakan daerah itu dengan mendirikan negara Papua.

Sebelum dua persetujuan PBB, Belanda sudah mendirikan negara "Boneka" Papua dengan lagu Papua dan bendera Papua. Tindakan ini berarti menantang Indonesia untuk bertindak lebih tegas dan cepat. Pemerintah RI memutuskan untuk mengetahkan semua dana, guna membebaskan Irian Barat (Moedjanto, 1988 : 122).

Dalam sidang umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian Barat diperdebatkan. Sekretaris Jendral PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker, untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian Barat kepada ke dua pihak yang bersengketa. Usul Bunker tersebut menyebutkan pada pokoknya agar pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dan penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun.

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan, agar waktu dua tahun itu diperpendek, tetapi ditolak Belanda. Pihak Belanda mau melepaskan Irian Barat dengan membentuk dahulu perwalian di bawah PBB, kemudian membentuk negara Papua. Sikap Belanda itu disambut Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersenjata, guna membebaskan Irian Barat.

Pada tahun 1961 bertepatan dengan hari ulang tahun dimulainya aksi militer Belanda ke 2, yaitu pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengucapkan Tri

Komando Rakyat di alun-alun Utara Yogyakarta, yang berisi :

1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum (Samawi, 1970 : 112).

Dalam rangka menyiapkan kekuatan militer untuk membebaskan Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan pembelian senjata ke Amerika Serikat, tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata itu dilanjutkan ke Eropa Timur, khususnya ke Uni Soviet.

Pada bulan Desember 1960, suatu misi di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/Kasad Jendral A.H. Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan perjanjian pembelian senjata. Misi tersebut disusul dengan misi ke dua dan ke tiga dan seterusnya oleh Kasad diadakan kunjungan ke beberapa negara yaitu India, Pakistan, Thailan, Pilipina, Australia, Zelandia Baru, Jerman, Prancis dan Inggris. Misi ini untuk mengadakan penjajakan dan mendapatkan kesan atau kepastian tentang sikap mereka seandainya terjadi perang antara Indonesia melawan Belanda. Mereka bersikap netral, tetapi menghendaki jalan musyawarah, agar tidak menggoncangkan dunia.

Dengan dicanangkannya Tri Komando Rakyat, dimulailah konfrontasi secara total terhadap Belanda. Untuk menyelenggarakan operasi-operasi militer pembebasan Irian Barat, maka pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan No. 1 Tahun 1962, membentuk Komando Mandala yang bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional ABRI serta Sukarelawan.

Dalam ksibukan Trikora ini, masih sempat dibentuk propinsi Irian Barat Gaya Baru, dengan putra Irian sebagai Gubernur. Disamping itu juga dibentuk sebuah Komando

Mandala Pembebasan Irian Barat, yang langsung memimpin operasi-operasi merebut Irian Barat. Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadir Jendral Suharto dengan markas besarnya di Makasar. Pada tanggal 13 Januari 1962 Brigaden Suharto dilantik dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jendral.

Pada bulan Januari itu ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut :

Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat :

1. Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno
2. Wakil Panglima Besar : Jendral A.H. Nasution
3. Kepala Staf : Mayor Jendral Ahmad Yani

Susunan Komando Pembebasan Irian Barat adalah :

1. Panglima Mandala : Mayor Jendral Suharto
2. Wakil Panglima I : Kolonel Laur Subono
3. Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena
4. Kepala Staf : Kolonel Ahmad Tahir (Nugroho N, 1981 : 159)

Operasi-operasi untuk membebaskan Irian Barat didasarkan atas instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 1 kepada Panglima Mandala yang isinya :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara RI.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah propinsi Irian Barat, sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi. Agar dalam waktu singkat di Irian Barat secara de facto diciptakan daerah bebas/kekuasaan RI (Nugroho N, 1981 : 159).

Untuk melaksanakan instruksi itu, Panglima Mandala menyusun Rencana Strategis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Sampai akhir tahun 1962

Dengan jalan infiltrasi memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang cukup ulet, sehingga tidak dapat dihancurkan secara bagian demi bagian oleh musuh. Malahan kesatuan-kesatuan ini harus dapat mendudukkan dan mengembangkan penguasaan wilayah, dengan membawa serta rakyat Irian Barat.

2. Awal tahun 1963

Mulai fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

3. Awal tahun 1964

Fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh wilayah Irian Barat (Nugroho N, 1981 : 159).

Sesuai dengan rencana Komando Mandala, pada sekitar bulan Maret hingga Agustus 1962, pasukan-pasukan TNI melakukan infiltrasi dengan pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara. Operasi pendaratan ini berhasil menyusupkan satu-satuan TNI di berbagai wilayah Irian Barat.

Disamping satuan-satuan TNI, dalam Komando Mandala ini ikut juga diterjunkan sukarelawan dan sukarelawati dari berbagai daerah di Indonesia. HERLINA adalah "Srikandi" Indonesia yang diterjunkan di hutan belantara Irian Barat. Atas jasanya, pemerintah menganugerahkan pending emas kepadanya, sehingga Herlina sering dijuluki "SI PENDING EMAS".

Komando Mandala kemudian membentuk satuan-satuan operasi untuk menguasai

wilayah yang didudukinya. Adapun beberapa satuan operasi yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Operasi Banteng yang berhasil mendarat dan menguasai daerah Fakfak dan Kaimana.
2. Operasi Srigala yang berhasil mendarat dan menguasai daerah sekitar Sorong dan Teminabuan.
3. Operasi Naga yang berhasil mendarat dan menguasai daerah Merauke.
4. Operasi Jatayu yang berhasil mendarat dan menguasai daerah Sorong, Kaimana dan Merauke (Nugroho N, 1981 : 160).

Pasukan Belanda yang semula meremehkan kemampuan TNI dalam usaha merebut Irian Barat, menjadi tercengang dengan berhasil didudukinya beberapa daerah wilayah Irian Barat. Oleh sebab itu sebelum diadakan operasi penyerangan khusus, pembebasan Irian Barat dengan operasi Jayawijaya dilaksanakan, pemerintah Belanda bersedia menyelesaikan masalah Irian Barat di meja perundingan (Nugroho N, 1981 : 162).

C. Pertempuran Aru

Bagi Angkatan Laut RI, persiapan untuk pembebasan Irian Barat sudah dirintis sejak pembelian kapal-kapal perang tahun 1957. Sejak tahun itu pula, Yos Sudarso sudah memikul beban tanggung jawab untuk membebaskan Irian Barat. Ia berkedudukan sebagai Wakil Pertama Kepala Staf Angkatan Laut, bagian operasi. Dari tugas yang sarat dengan jiwa patriotisme inilah nanti yang makin mendorong pada putra bangsa untuk ikut serta berjuang demi negara tanpa mengenal rasa takut.

Nama harum Yosafat Sudarso seorang putra bangsa terbaik, tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa heroik dalam pertempuran habis-habisan di Laut Aru. Yos Sudarso mendapat tugas untuk memeriksa kesiap-siagaan Angkatan Laut RI dalam hubungannya

dengan Trikora. Pada bulan Agustus 1962, kapal selam RI Candrasa dengan komandan Perwira Pertama Mardiono, bertugas mendaratkan pasukan RPKAD di Irian Barat. Berkat perhitungan serta rencana yang cukup matang dari Yos Sudarso. Komandan RI Candrasa Mardiono pun ikut pula menentukan keberhasilan pendaratan pasukan tersebut (Soenjata K, 1978 : 44).

Pada tanggal 15 Januari 1962, tiga buah Kapal Cepat Torpedo (MTB) ALRI sedang mengadakan patroli di perbatasan Irian Barat. Ketiga kapal itu ialah RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang dan RI Harimau. Di dalam eskader kapal patroli itu, terdapat pimpinan ABRI antara lain Komodor Yos Sudarso Wakil Kepala Staf ALRI, Kolonel Sudomo dan Kolonel Mursid.

Ketika ajudannya Letnan FX. Suprpto dan Kapten Wiratno sedang duduk-duduk di ruangan tengah RI Macan Tutul, masuk kolonel Yos Sudarso : "Mengasolah dulu, perjalanan masih jauh!". Tetapi sebelum ajudannya masuk ke kamar, ditahannya, sambil bertanya : "Apakah kamu sudah sembahyang?" Ajudannya balik bertanya : "Memang ada apa, Komodor?" "Ah siapa tahu, kalau terjadi apa-apa bagaimana?" jawab Yos sambil masuk kamar diikuti ajudannya dan sembahyang bersama (Soenjata K, 1978 : 44).

Tidak lama kemudian terdengar deru pesawat terbang jenis Neptune dan Firefly milik Belanda, melintasi ketiga MTB ALRI. Disamping itu dari pesawat radar tampak jelas ada dua buah kapal perang jenis perusak. Tanpa diduga kedua kapal perusak menembakkan peluru suar, yang menerangi ketiga kapal MTB. Dalam keadaan panik dan terkejut, Komodor Yos Sudarso mengambil alih pimpinan komando kapal patroli dari Kapten Wiratno. Yang disusul perintah tembakan balasan dan komando : "Kobarkan semangat pertempuran!"

Mengetahui kekuatan tidak seimbang, pihak Belanda mengadakan serangan makin gencar, berusaha mengepung eskader ALRI. Ketika keadaan makin gawat, terdengarlah komando dari Komodoro Yos Sudarso. "Robah haluan RI Macan Tutul, keluar dari formasi dan langsung serang musuh !" Akibatnya, tembakan lawan terarah kepada Macan Tutul. Hal ini memang disengaja oleh Yos Sudarso, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kapal lainnya (Soeroto, 1974 : 34).

Bagian depan RI Macan Tutul kena tembakan, namun dalam keadaan yang demikian gawat, Komodor Yos Sudarso masih sempat memberikan komando : terjang kapal musuh, kita tenggelam bersama mereka. RI Macan Tutul tidak dapat dikendalikan lagi dan tepat kena tembakan di bagian tengah kapal. Meskipun demikian Komodor Yos Sudarso masih berusaha memberikan perintah terakhir dalam keadaan luka parah. Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran laut secara ksatria.

Akhirnya suatu ledakan mengguruh, menghancurkan lemburkan keheningan malam gulita. Macan tutup lenyap seluruhnya, tenggelam ke dalam perut Laut Aru yang sangat ganas. Samar-samar masih terdengar di angkasa raya pekik Komodor Yos Sudarso : Kobarkan semangat pertempuran ! Pada tanggal 15 Januari gugurlah Komodor yang patriotik bersama para prajurit sejati sebagai pahlawan bangsa. Darah mereka yang menyatu dengan air Laut Aru tidak sia-sia dan semakin menambah semangat pengorbanan dari putra-putri bangsa kepada tanah air tercinta.

BAB V

REAKSI DAN DAMPAK TRI KOMANDO RAKYAT

A. Reaksi Negara-Negara Barat

Sebelum dan semasa dilaksanakannya konfrontasi dalam sengketa Irian Barat, negara-negara Barat lebih banyak berpihak kepada Belanda, karena terikat oleh hubungan tradisionalnya. Makin eratnya hubungan tradisionalnya ini, tampak setelah usainya Perang Dunia II, di mana Belanda sangat tergantung kepada Inggris dalam usaha membebaskan diri dari pendudukan Jerman. Perselisihan antara Belanda dengan Inggris sebelum terjadinya Perang Dunia II, lebih banyak diwarnai oleh persaingan di dalam memperebutkan tanah-tanah koloni, dengan ciri-ciri imperialismenya masing-masing.

Kedua negara akhirnya dapat bersatu setelah adanya ekspansi Jerman ke seluruh Eropa. Belanda menjadi korban pertama dari serangan Jerman, sedangkan Inggris merasa sangat cemas atas keselamatan negaranya. Harapan keduanya adalah bantuan dari Amerika Serikat, dalam usaha membebaskan Eropa Barat, yang berhasil membawa pengaruh kekuatan militernya ke arah persekutuan ideologinya dengan Eropa Barat. Eropa Barat menjadi basis kekuatan ideologi maupun ekonomi Amerika Serikat, sekaligus menjadi tameng baginya apabila terjadi perang melawan Uni Soviet, sehingga Amerika terhindar dari malapetaka.

Setelah Perang Dunia II selesai, terjadi perubahan sikap besar-besaran atas timbulnya perbedaan ideologi dari para pemenang Perang Dunia II atas Jerman, Jepang dan Italia. Pihak Sekutu yang terdiri dari negara-negara Amerika, Eropa Barat dan Eropa Timur menjadi pecah ke dalam dua kubu, akibat perselisihan ideologi yang sangat

bertentangan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Ideologi Kapitalis Liberal yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, tidak pernah dapat mentolerir ideologi komunis, yang dianut oleh negara-negara Eropa Timur yang dipelopori Uni Soviet (S. Adisusilo, 1991 : 157).

Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berusaha untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya, sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan antara Blok Barat dengan Blok Timur, yang lebih dikenal sebagai "perang dingin". Masing-masing ingin mengalahkan lawannya dengan memperkuat dirinya, untuk meningkatkan keunggulan persenjataannya. Masing-masing berlomba untuk menjadi pemimpin dunia, dengan menawarkan bantuan-bantuan kepada negara-negara lain, yang belum terikat oleh blok masing-masing. Blok Barat maupun Blok Timur ini saling mengaku sebagai pelopor demokrasi dan menuding blok lawannya sebagai musuh utama demokrasi (S. Adisusilo, 1991 : 158).

Bagi negara-negara yang baru merdeka pun mulai terjadi polarisasi di antara mereka, sehingga bagi negara-negara baru yang muncul boleh jadi menjatuhkan pilihannya, masuk ke Blok Barat atau ke Blok Timur. Bagi negara-negara bekas jajahan Inggris, rata-rata dapat menentukan sikap untuk mengikuti jejak Inggris sebagai anggota negara persemakmuran, karena masih merasa terikat oleh hubungan historis, setelah dianggap matang, sehingga masih memiliki loyalitas kepada negara bekas penjajahnya.

Negara-negara bekas jajahan selain Inggris, khususnya Indonesia bekas jajahan Belanda, merasa sudah tidak ada ikatan lagi dengan bekas penjajahnya, karena telah terlanjur memiliki rasa kebencian, yang telah lama ditanamkan oleh penjajah sendiri. Nasionalisme yang timbul akibat tekanan kolonialisme dan imperialisme Barat yang kolot, mengakibatkan timbulnya jarak antara bekas penjajah dengan bekas jajahannya. Jadi

adanya hubungan historis justru menumbuhkan kesan negatif, dari negara-negara merdeka bekas jajahan imperialis kuno, seperti hubungan antara Indonesia dan Belanda ini (Cindy Adams, 1966 : 372).

Dari pandangan bangsa penjajah, bahwa usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan dengan jalan revolusi, telah dicurigai sebagai gerakan komunis. Bangsa-bangsa terjajah yang sulit untuk mencapai kemerdekaan dengan jalan damai, merasa bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari penjajahan, hanyalah meminta bantuan kepada negara-negara komunis, meskipun mereka tidak berorientasi ke ideologi komunis. Itulah sebabnya maka banyak negara baru yang merdeka, kemudian bersahabat dengan negara komunis. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang bersahabat dengan Uni Soviet dan RRC, karena mempunyai kebutuhan dalam bidang persenjataan untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan usaha untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Republik Indonesia berpaling ke negara Uni Soviet dan Eropa Timur, pada mulanya hanya karena usahanya untuk minta bantuan kepada negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat tidak berhasil. Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Barat lainnya, lebih memberatkan hubungannya dengan Belanda, sehingga Indonesia merasa mendapatkan kesulitan berhubungan dengan Barat. Dalam sengketa Irian Barat ini, negara-negara Barat khawatir posisi Belanda akan terjepit, sehingga akan mempengaruhi hubungan antara masyarakat Eropa dengan Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat sendiri, Eropa Barat merupakan benteng penahan komunisme yang dapat diandalkan dan sebagai sumber pengembangan perekonomian yang sangat menguntungkan (S. Adisusilo, 1991 : 161).

Sebagai negara di kawasan Asia-Pasifik, Australia tidak terikat oleh adanya hubungan etnis dengan bangsa-bangsa di kawasan ini, karena secara historis bangsa Australia adalah keturunan Inggris, sehingga mereka lebih merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Barat. Itulah sebabnya maka Australia selalu condong untuk bersekutu dengan negara-negara Barat, karena baik asal-usul, pandangan hidup, pola pikir dan ideologinya adalah merupakan bagian dari bangsa Barat.

Dalam sengketa Indonesia-Belanda atas Irian Barat, Australia lebih memihak bahkan terang-terangan menentang usaha RI untuk menyatukan Irian Barat. Australia mempunyai dua asumsi, pertama dengan dikuasainya Irian Barat oleh RI, akan membahayakan posisi Irian Timur yang menjadi wilayahnya. Australia khawatir, Irian Timur akhirnya juga akan dicaplok oleh Indonesia. Yang kedua, bahwa karena ikatan ras kulit putih dengan Belanda, maka Australia memihak Belanda, untuk ikut menjaga harga diri dan martabat sesama kulit putih. Kekhawatiran Australia bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis adalah terlalu berlebihan, tetapi bisa jadi karena takut terhadap Amerika Serikat dan ingin mendapatkan keuntungan sepihak (Nugroho N, 1986 : 57).

SEATO yang didirikan tahun 1954 untuk membendung komunisme di Asia Tenggara, juga mengandung muatan kecurigaan terhadap Indonesia, yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, namun nampak condong ke Blok Timur. Bagi Indonesia, kecenderungan agak miring ke Blok Timur, sebenarnya mula-mula tidak lebih dari usaha untuk mencari bantuan persenjataan demi keamanan dalam negeri dan untuk membebaskan Irian Barat (Baharuddin Lopa, 1962 : 69). Setelah jatuhnya Kabinet Sukiman, maka tertutuplah kemungkinan mendapatkan bantuan dari Barat, karena hubungan mesra Kabinet Sukiman dengan Amerika banyak mendapatkan kecaman dalam negeri Indonesia, sehingga Amerika menjadi tersinggung (Moedjanto, 1988 : 86).

Semua persekutuan militer Barat, baik NATO, CENTO, ANZUS, OAS, SEATO maupun Pakta Baghdad, merupakan kekuatan militer untuk menahan laju komunisme di seluruh dunia. Untuk menandingi kekuatan militer Barat ini, Uni Soviet dengan negara-negara Eropa Timur mendirikan persekutuan militer Blok Timur, Polandia, Czechoslovakia, Hongaria, Rumania dan Bulgaria. Tidak berbeda dengan Blok Barat, Blok Timur ini juga mengembangkan pengaruhnya ke negara-negara yang baru merdeka dan yang sedang dalam proses kemerdekaan. Bagi negara merdeka prosesnya melalui revolusi bersenjata, akan memandang Blok Timur merupakan kawan atau sahabat yang dapat menolong (Nugroho N, 1986 : 63).

RI yang dalam proses konsolidasi, karena tidak mendapatkan bantuan dari negara Blok Barat, terpaksa minta bantuan kepada Uni Soviet, sehingga menyebabkan kecurigaan Blok Barat. SEATO yang didirikan pada jaman pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower di Amerika dengan Armada ke 7 nya, selalu mengawasi gerak-gerik Indonesia dalam usahanya menyatukan Irian Barat. Didirikannya pangkalan SEATO di Filipina, Thailand dan di Vietnam Selatan merupakan ancaman bagi RI, karena menghalangi kebebasannya dalam hubungannya dengan Uni Soviet dan RRC. Pangkalan Armada Inggris dengan kepala-kepala nuklirnya di pulau Christmas selatan Jawa, merupakan bahaya langsung bagi kedaulatan RI (Nugroho N, 1986 : 65).

Ternyata dari aktivitas Armada ke 7 Amerika Serikat dengan Armada Inggris yang berpangkalan di Christmas, memunculkan gerakan separatisme kedaerahan yaitu PRRI dan Permesta, yang terang-terangan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris dan Taiwan (Cindy Adams, 1966 : 399). Karena kesibukan dalam negerinya, RI menjadi agak kendor klaimnya atas Irian Barat, sehingga memberikan kesempatan Belanda untuk memperkuat kedudukannya di Irian Barat.

Dari sekian banyak negara Barat yang agak lunak terhadap Indonesia dalam konfliknya dengan Belanda, hanya Prancis dan Italia dengan alasan yang berbeda. Prancis lebih banyak netralnya terhadap sengketa Irian Barat, karena dilatar-belakangi oleh perselisihannya dengan Amerika Serikat soal NATO dan pertahanan nuklir di Eropa Barat. Prancis tidak senang terhadap Amerika, atas dominasi politik, ekonomi dan pertahanannya di Eropa Barat. Prancis berpandangan bahwa Eropa Barat harus lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Prancis dapat mempertahankan diri apabila terjadi perang nuklir. Dengan tidak terikat oleh NATO, maka Prancis lebih bebas dalam politik luar negerinya dan sangat supel dalam masalah yang bersifat universal (Burhanuddin Lopa, 1962 : 70).

Bagi Italia, mungkin karena pengaruh pandangan Vatikan yang agak lunak terhadap Indonesia, maka Italia juga merupakan salah satu dari sekian banyak negara Barat yang tidak banyak menolong Belanda. Peranan Mgr. Sugiyopranoto yang sangat erat dengan Presiden Sukarno sejak jaman revolusi, berhasil meredam kecurigaan Vatikan terhadap Indonesia. Mgr. Sugiyopranoto di mata Vatikan adalah figur "nasionalis kristiani sejati", yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sehingga dapat mempengaruhi Presiden Sukarno, dalam peranan politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Sukarno selalu berpaling kepada para tokoh kristiani di dalam menentukan sikap, terhadap masalah yang dihadapinya, termasuk kebijaksanaan dalam usaha diplomatiknya atas Irian Barat.

Oleh karena setiap usaha diplomasi yang sangat membosankan itu selalu gagal menghasilkan kesepakatan dengan Belanda, maka dengan sangat terpaksa politik kekerasan melalui konfrontasi dijalankan oleh RI. Indonesia sudah tidak perlu memperhitungkan solidaritas bangsa Barat dalam membantu Belanda. Tekad yang bulat dengan segala resikonya harus ditempuh, apapun yang akan terjadi dan hanya ada kompromi apabila

Belanda mau menyerahkan Irian Barat. Gambaran dunia tentang konfrontasi ini akan menyulut timbulnya Perang Dunia III, apabila tidak segera diredam (Nugroho N, 1986 : 61).

Negara-negara Barat sangat khawatir akan peran tentara Uni Soviet, yang mungkin secara langsung diterjunkan di Irian Barat, sehingga mau tidak mau, dengan keadaan terpaksa negara-negara Barat harus membela Belanda. Apabila dugaan Barat ini benar, pasti tidak akan terhindarkan lagi akan terjadi perang langsung antara kekuatan adidaya. Amerika dan Uni Soviet akan perang habis-habisan di Irian Barat dan terjadilah Perang Dunia III yang dahsyat. Negara-negara Barat tidak percaya, bahwa tentara Indonesia akan mampu melakukan infiltrasi dengan strategi yang jitu, karena tidak berhasil dideteksi oleh dinas intelejen Belanda (Nugroho N, 1986 : 62).

Setelah dinas intelejen Amerika tidak membuktikan, bahwa tidak ada tentara Uni Soviet seorompokpun yang terlibat dalam gerakan infiltrasi tentara Indonesia di Irian Barat, maka negara-negara Barat khususnya Amerika dan Inggris mulai mengendorkan bantuannya kepada Belanda. Keberhasilan infiltrasi yang mulus, sesungguhnya hanya dilakukan oleh putra-putra Indonesia sendiri dengan persenjataan modern. Dari adanya kenyataan tersebut, sangat na'if apabila tentara Indonesia bersama para sukarelawan, yang hanya dengan kekuatannya sendiri, harus dikeroyok oleh negara-negara Barat. Tak akan ada untungnya membela Belanda yang membabi buta, hanya untuk mempertahankan harga diri secara keliru. Apabila Belanda terus dibantu, dikhawatirkan justru akan semakin memperbesar pengaruh Uni Soviet atas Indonesia dan Indonesia akan semakin larut ke dalam ideologi komunis (Nugroho N, 1986 : 64).

Pada akhirnya reaksi negara-negara Barat atas politik konfrontasi Indonesia untuk menghalau Belanda dari Irian Barat, menjadi semakin lunak dan meraka mulai mundur satu

demi satu. Australia yang pada permulaan konfrontasi selalu menentang Indonesia dan memperkuat pertahanannya, baik di pantai utara Australia maupun di perbatasan Irian Timur, akhirnya mundur secara teratur dan mulai bersikap netral. Amerika, Inggris, Belgia dan lainnya juga mulai mereda, setelah tidak terbukti adanya tentara Soviet yang menyusup di tengah-tengah tentara dan sukarelawan Indonesia (Nugroho N, 1986 : 65).

Sebelum dicanangkannya Trikora, Jendral Nasution telah melaksanakan kunjungan misinya ke negara-negara Barat untuk menjajaki dan mendapatkan kesan atau kepastian atas sikap mereka, apabila terjadi perang antara Indonesia melawan Belanda di Irian Barat.

Sebenarnya mereka tidak terikat oleh Belanda, hanya karena adanya tradisi saja, mereka merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan Belanda. Secara militer mereka terikat dalam NATO, tetapi tindakan solidaritas mereka tergantung dari peran Amerika, dalam mengatur mekanisme pakta tersebut. Kepada Indonesia, mereka menyarankan agar dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi dan agar dapat mencegah terlibatnya militer asing ke kancah peperangan di Irian Barat.

Sampai dengan dilaksanakannya konfrontasi militer, Indonesia dapat menepati janjinya dengan tidak melibatkan tentara asing masuk Irian Barat, sehingga Barat berposisi netral. RI mendapat keuntungan dari sikap negara-negara Barat yang pada mulanya ikut mengancam, namun pada akhirnya tidak membantu Belanda, bahkan Amerika mau menekan Belanda.

B. Reaksi Negara-Negara Berkembang

Jauh sebelum dilaksanakannya Tri Komando Rakyat, Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika. KAA ini diadakan di Bandung pada tanggal

18-24 April 1955, yang diikuti oleh 29 negara. KAA ini merupakan puncak penggalangan solidaritas di kalangan negara-negara Asia-Afrika untuk saling memberikan dukungan yang tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. KAA ini membicarakan berbagai masalah mengenai kepentingan bersama Asia-Afrika, kolonialisme, imperialisme, dan perdamaian dunia serta kerjasama yang mencakup bidang ekonomi dan budaya (Nugroho N, 1981 : 146).

Konferensi juga menekankan adanya perluasan perdagangan antara bangsa Asia-Afrika dan menganjurkan agar para peserta mempergunakan sebaik-baiknya organisasi-organisasi internasional yang ada untuk memajukan ekonomi. KAA mendukung sepenuhnya prinsip untuk memperjuangkan dasar hak-hak manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Piagam PBB. Hak-hak dasar manusia yang dimaksud adalah prinsip untuk menentukan nasibnya sendiri, yang merupakan syarat mutlak setiap bangsa. KAA mengutuk politik Apartheid yang dilakukan oleh beberapa rezim kulit putih di Afrika dan di benua lain.

Berkaitan dengan bangsa-bangsa Asia-Afrika yang belum merdeka, konferensi menyetujui untuk mengutuk kolonialisme dengan segala manifestasinya. Kolonialisme adalah merupakan kejahatan yang harus segera diakhiri. Bangsa-bangsa Asia-Afrika berusaha membantu perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka dan menyerukan kepada negara penjajah, agar segera memberi kemerdekaan kepada bangsa yang dijajahnya.

Dokumen utama yang dihasilkan oleh Konferensi Asia-Afrika, adalah pernyataan tentang usaha memajukan perdamaian dan kerjasama di dunia, dengan jalan menghormati integritas teritorial dan tidak melakukan intervensi ke dalam soal-soal dalam negeri

masing-masing negara. Dokumen ini berisi 10 pasal dan dikenal dengan nama "Dasasila Bandung", yang berisi :

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integrasi semua bangsa.
3. Mengikuti persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar.
b. Tidak mengadakan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman, agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penjelasan hakim ataupun cara damai lain-lain menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai Piagam PBB.
9. Mengajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional (Soepardo, 1960 : 128).

Dasasila Bandung ini menjadi terkenal dan merupakan rangkaian asas yang dapat diterima dan dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah penting bagi dunia, sesuai asas-asas Piagam PBB. Peristiwa kebangkitan Asia-Afrika sejak KAA di Bandung merupakan suatu kekuatan baru di dunia, terutama di forum PBB, merupakan kelompok besar.

Dipandang dari kepentingan Indonesia sendiri, KAA merupakan jalan untuk mendapatkan simpati dari luar negeri atas usahanya untuk mengembalikan Irian Barat. Setidaknya sesuai dengan pasal 5, Indonesia telah mendapatkan dukungan moral dari negara-negara peserta KAA, sehingga memperkuat posisi Indonesia di pihak yang benar. Pendudukan Belanda atas Irian Barat merupakan masalah utama dalam KAA dan memberikan angin segar bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka, untuk segera memperjuangkan kemerdekaannya melalui solidaritas Asia-Afrika.

Tri Komando Rakyat yang didengungkan di Yogyakarta, mendapatkan sambutan yang sangat besar, tidak saja bagi bangsa Indonesia, melainkan secara universal juga mendapatkan sambutan yang hangat dan simpatik dari bangsa-bangsa yang sedang berkembang dan dari Eropa Timur. Komando Rakyat tertera pada poin ke 3, yang berisi tentang persiapan mobilisasi umum, menumbuhkan kerelaan berkorban dari seluruh masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan sukarelawan Trikora. Mereka tidak takut untuk diterjunkan di Irian Barat dengan segala resikonya, baik dengan dukungan logistik maupun tanpa logistik, mendesak untuk segera dapat menghalau Belanda.

Tanggapan yang positif dari luar negeri, baik dari negara-negara Asia-Afrika maupun dari negara-negara Blok Timur, sangat melegakan dan membesarkan hati rakyat dan pemerintah Indonesia. Bangsa Indonesia merasa mendapatkan kekuatan moral dan merasa tidak sendirian dalam usaha memperjuangkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari dalam negeri sendiri jumlah pendaftar calon sukarelawan ada 10 juta orang, sedangkan dari luar negeri tercatat tidak kurang dari 2 juta orang. Bagi pemerintah RI, keberadaan sukarelawan dalam negeri berapapun jumlahnya tidak menjadikan suatu

masalah, namun demikian bagaimana menyikapi bantuan sukarelawan dari luar negeri, hal ini harus ekstra hati-hati. Memang sukarelawan dari luar negeri minta pengertian kepada pemerintah RI, bahwa keberadaan mereka untuk membantu Indonesia jangan diartikan datang dari pemerintah mereka masing-masing, melainkan hanya merupakan kehendak setiap individu (Nugroho N, 1986 : 61).

Yang lebih membesarkan hati bangsa Indonesia, bahwa segala peralatan perang beserta logistiknya akan ditanggung mereka sendiri. Mereka juga bersedia diatur dan dipimpin oleh putra-putra Indonesia dalam komando dan strategi perangnya di dalam usaha untuk menghalau Belanda dari Irian Barat. Dipandang dari kebutuhan material dan moral, kesediaan mereka membantu RI sangat menguntungkan, namun pertimbangan politik akan menjawab lain. Meskipun bantuan mereka merupakan bantuan yang bersifat individu, tidal ayal lagi pasti akan menyeret nama bangsa dan negaranya, sehingga akan mengundang intervensi dari negara-negara Barat yang mengingatkan kepada Indonesia, pada waktu kunjungan misi Jendral Nasution.

Setelah dipertimbangkan secara politis, maka ditetapkan oleh pemerintah, bahwa dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, bantuan sukarelawan dengan segala peralatannya dari luar negeri, masih ditunda dalam tenggang waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut. Dari mereka juga dapat memaklumi posisi Indonesia yang kurang menguntungkan, sedangkan cadangan sukarelawan putra-putra bangsa sendiri mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Buktinya bahwa putra-putra bangsa berhasil menduduki wilayah-wilayah de facto di Irian Barat.

C. Perubahan Sikap Amerika Serikat

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower, tahun 1960 Presiden Sukarno diundang ke Amerika Serikat untuk kunjungan persahabatan antara kedua negara. Persahabatan kedua negara ini tidak lebih dari hubungan kosmetik, yang lebih banyak diwarnai oleh sikap dan sifat pribadi kedua presidennya. Di satu pihak Presiden Eisenhower mengundang Sukarno hanya untuk memperlihatkan, bahwa bangsa dan negara Amerika di bawah kepemimpinannya, dapat membuat semua bangsa di dunia bertekuk lutut kepada Amerika Serikat.

Setiba Presiden Sukarno di lapangan terbang, tidak ada penyambutan kenegaraan oleh Presiden Eisenhower dan Presiden Sukarno masih menggambarkan, bahwa akan ada penyambutan di pintu gerbang Gedung Putih. Sampai di gerbang Gedung Putih pun ternyata juga tidak ada sambutan sama sekali, bahkan Presiden Sukarno harus dengan hati kesal terpaksa menanti di ruang tunggu, sungguh keterlaluan. Hampir satu jam Presiden Sukarno meunggu dan merasa bahwa harga dirinya terlalu dilecehkan oleh Eisenhower, maka Sukarno bilang pada protokol, apabila masih lama menunggu, lebih baik akan pulang.

Presiden Eisenhower keluar setelah mendapat laporan tentang sikap Presiden Sukarno yang tidak mau diremehkan. Sukarno adalah wakil bangsa yang besar yang masih punya martabat dan harga diri, maka tidak mau diremehkan seperti pengemis. Eisenhower tidak meminta ma'af, bahkan tidak berusaha untuk mempersilahkan tamunya, ketika pada akhirnya keduanya bersama-sama masuk ke ruang tamu. Gemas hari Sukarno, karena pada waktu Eisenhower mau memikat hati negara Arab, ia menyambut Arab dengan segala kemegahan dan kebesarannya, meskipun raja itu hanya mengantarkan anaknya ke rumah sakit di Amerika Serikat, bukan untuk kunjungan resmi kenegaraan (Cindy Adams, 1966 : 436).

Dalam pembicaraannya dengan Eisenhower, Sukarno secara tegas mengatakan bahwa kunjungannya ke Amerika tidak untuk mengemis, melainkan sebagai seorang Presiden yang kedudukannya sejajar dengan Presiden manapun di dunia ini. Jadi dimintanya Presiden Eisenhower agar menghormatinya sebagai dua orang sahabat yang sama-sama menjabat sebagai Presiden. Sadarlah kemudian Eisenhower dan untuk selanjutnya ia senantiasa bersikap sopan kepada Presiden Sukarno dan pelayanan terhadap tamunya dilaksanakan secara megah dan penuh pengertian.

Dalam pembicaraannya dengan Menlu John Foster Dulles, Sukarno mencoba menerangkan kepadanya tentang dasar politik bangsa Indonesia. Dikatakannya bahwa bangsa Indonesia tidak akan meniru Uni Soviet dan tidak mengikuti dengan membabi buta, jalan yang direntangkan oleh Amerika. Amerika hanya menyukai sesuatu bangsa atau negara lain, apabila memilih pihak yang dikehendaknya. Indonesia tidak akan menjadi negeri satelit dari salah satu blok, tetapi politik bebas aktif Indonesia disalah artikan oleh Amerika. Indonesia yang tidak sependirian dengan Amerika, secara otomatis sudah dicap sebagai blok Uni Soviet (Cindy Adams, 1966 : 408).

Dulles menjawab dengan tajam, bahwa politik Amerika bersifat global dan suatu negara harus memilih salah satu pihak, sedangkan yang netral adalah immoral. Dulles dan Eisenhower adalah pasangan yang keras kepala bagi negara-negara radikal, padahal sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tidak sekeras melebihi negara-negara Blok Timur. Ironisnya bahwa di dalam menghadapi negara-negara kaya minyak, Amerika dengan kedua pasangan ini justru seakan akan mau menyembah di bawah telapak kaki penguasanya (Cindy Adams, 1966 : 408).

Dalam pembicaraan lanjutannya dengan Eisenhower, Sukarno mulai dapat menangkap pandangan Amerika, yang senantiasa hanya bernilai basa-basi dan penuh

apriori. Sama sekali tidak mengandung adanya kontak batin antara dua pemimpin bangsa yang sama-sama memiliki kaliber dunia, namun hanya dipisahkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, teknologi dan usia bangsa dan negaranya. Sukarno menganggap Amerika Serikat adalah pelopor dari The Old Established Forces yang harus dilawan habis-habisan oleh kelompok The New Emerging Forces . Sukarno menyebut Oldefo sebagai blok kapitalis-imperialis-reaksioner Barat yang kaku (Nugroho N, 1981 : 155).

Diantara adegan-adegan pembicaraan kedua pemimpin tersebut, Sukarno mengatakan bahwa Amerika tidak dapat memahami masalah Asia. Benua Asia sekarang sedang dimabuk oleh kemerdekaan dan seluruh bangsa di benua ini merasakan kemerdekaan dengan perasaan gembira yang amat sangat. Sukarno meminta kepada Amerika, agar memahami, bahwa jika suatu bangsa selama hidupnya menderita kepahitan hidup, kutuk, laknat dan penindasan terhadap hasrat untuk merdeka, maka tidak akan melepaskan kemerdekaan itu lagi, apabila sekali telah berhasil merebutnya (Cindy Adams, 1966 : 410).

Sukarno mengatakan kepada Eisenhower, bahwa sebagai sahabat yang bijaksana dan lebih tua, Amerika boleh memberi nasehat, tetapi jangan mencampuri persoalan dalam negeri Indonesia. Indonesia telah melihat dan merasakan kapitalisme dan demokrasi Barat pada orang Belanda, sehingga Indonesia tidak berkeinginan untuk memakai sistem itu. Indonesia akan menumbuhkan suatu cara baru yang hanya cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian ini bukanlah barang yang bisa diekspor, tetapi sebaliknya Indonesia tidak akan menerima impor, berupa ajaran-ajaran yang mengikat (Cindy Adams, 1966 : 410).

Dari Amerika Serikat, Sukarno kemudian mengunjungi Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Timbullah reaksi yang hebat dari Washington, karena Amerika memandang

Indonesia sebagai negara yang tidak tahu diri dan Sukarno adalah figur pemimpin bangsa yang munafik. Amerika nampaknya menganggap setiap adanya gerakan kemerdekaan diilhami oleh komunis. Amerika lupa, bahwa negaranya adalah hasil kemerdekaan dari masa penjajahan hampir 200 tahun yang lalu.

Kunjungan Sukarno ke Moskow dan Peking dikatakan oleh Amerika sebagai tindakan yang salah dan tidak menghargai Amerika yang telah menyambutnya dengan penuh keramahan. Pers Amerika segera mencap Sukarno sebagai seorang maha pencinta Tuhan, yang begitu mudah menyembah Komunis-Atheis. Suara-suara sumbang dari Amerika ini perlu dikaji lebih mendalam, karena ada juga suara yang mengatakan bahwa Sukarno adalah pemimpin suatu bangsa yang tidak mengenal takut di dalam bayang-bayang dua super-power yang saling unjuk gigi. Sukarno adalah pemimpin non-blok yang bercita-cita untuk ikut meredakan ketegangan dunia dan seorang nasionalis sejati (Cindy Adams, 1966 : 411).

Di Amerika ada dua pandangan yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa sikap Dulles dan Eisenhower tersebut tidak mencerminkan karakter bangsa Amerika. Sikap kedua orang ini lebih diwarnai oleh karakter golongan konservatif yang mendominasi partai Republik, sehingga penilaian terhadap bangsa-bangsa tertindas sangat bersifat subyektif. Lain dengan partai Demokrat, yang mempunyai pandangan cakrawala politik lebih progresif, sehingga dalam menilai munculnya negara-negara merdeka baru, dapat menggunakan dasar obyektivitas dan realitas. Partai Demokrat dapat memahami masalah Asia dan Afrika, yang sedang dimabuk oleh kemerdekaan, karena bangsa Amerika dahulu juga pernah merasakan penderitaan sebagai bangsa terjajah (Cindy Adams, 1966 : 412).

Selama partai Republik masih berkuasa di Amerika Serikat maka perjuangan untuk membebaskan Irian Barat terus akan terhambat, karena Amerika tidak mau Belanda

menjadi korban dari tindakan Indonesia yang dicap sebagai agresor. Eisenhower justru makin gencar memojokkan Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Blok Timur. Kegiatan Armada ke 7 nya tidak hanya digerakkan di kawasan Pasifik, melainkan juga dikawasan samodra Hindia bersama dengan kekuatan militer Inggris di pulau Chrismast selatan pulau Jawa. Eisenhower semakin garang terhadap Indonesia dengan memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontakan PRRI dan Permesta, bersama Inggris (Cindy Adams, 1966 : 435).

Pada paska pemerintahan Eisenhower, muncullah harapan bagi Indonesia, karena hasil pemilihan umum di Amerika dimenangkan oleh Partai Demokrat. Kepemimpinan Presiden Kennedy segera diuji oleh kondisi konflik global dan situasi perang dingin yang semakin mengancam keamanan dunia. Terbawa oleh wataknya yang low profil dan karakter partainya yang demokrat, Presiden Kennedy berhasil menarik simpati dari para pemimpin dunia ke tiga termasuk Presiden Sukarno.

Presiden Kennedy dapat memahami jalan pikiran Sukarno, tidak sekedar basa-basi dan sungguh-sungguh mau menghargai perbedaan yang ada. Pada waktu kunjungan Presiden Sukarno di era pemerintahannya, Kennedy menyambutnya dengan sangat ramah sebagai sahabat yang seakan-akan lama tidak berjumpa. Di sa'at menikmati pesiar singkat dan naik helikopternya, sungguh terasa jalinan perasaan saling pengertian di antara keduanya.

Dalam pertemuan ini seakan-akan tidak masuk akal, bahwa kedua pemimpin yang berlainan kutub dapat merasakan kebahagiaan bersama. Bahkan helikopter baru milik Presiden Kenney, yang dirakit secara khusus tak ada duanya ini, apabila Sukarno berkenan menerimanya sebagai sahabat, maka bolehlah dibawa pulang ke Indonesia. Sukarno mau menerima pemberian ini bukan sebagai peminta-minta, melainkan karena dihinggapi oleh

perasaan yang tulus dari seorang sahabat yang tulus pula. Sampai akhir kekuasaan Sukarno, helikopter itu masih menghiasi halaman istana kepresidenan dan gambar Kennedy sekeluarga masih terpasang rapi di kamar tidur Sukarno (Cindy Adams, 1966 : 436).

Dalam kesibukannya mengencarkan Trikora, Indonesia tidak terlalu merisaukan Amerika Serikat, karena Presiden Kennedy semakin bersikap lunak terhadap Indonesia. Melihat situasi yang semakin panas, Amerika Serikat merasa khawatir bila sewaktu-waktu pecah perang terbuka. Perang terbuka ini akan melibatkan negara-negara pendukung Indonesia dan Belanda, yang memungkinkan pecahnya Prang Dunia ke III. Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Eisenhower sangat keras terhadap Indonesia, tetapi setelah masa pemerintahan Presiden Kennedy menjadi pasif dalam sengketa Irian Barat, karena sebenarnya hal ini merupakan urusan kedua negara yang bersangkutan (Nugroho N, 1986 : 72).

Amerika yang semula bersikap pasif terhadap masalah Irian Barat, merasa ikut berkewajiban mengambil prakarsa untuk mengadakan perundingan antara Indonesia-Belanda. Presiden Kennedy menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk tidak menggunakan kekerasan (Michael Laifer, 1986 : 96). Menanggapi Presiden Kennedy, Sukarno meminta agar Amerika Serikat ikut campur tangan, untuk mencegah penggunaan kekerasan yang dilakukan Belanda membentuk Papua Merdeka (Nugroho N, 1986 : 72).

Indonesia mengutus Subandrio ke Washington dan menyampaikan prospek komunis di Indonesia, apabila pertikaian tidak diselesaikan untuk keuntungan Indonesia. Dengan telah terjalinnya hubungan pribadi kedua Presiden yang sangat baik itu, maka kunjungan Subandrio ke Amerika membawa hasil. Amerika Serikat mengemukakan dan menyerukan kepada Indonesia dan Belanda, agar masalah Irian Barat diselesaikan melalui usul-usul



Bunker. Inti usul-usul Bunker tersebut meliputi penyerahan atas wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Selain itu Amerika Serikat juga memberitahukan, bahwa Belanda sudah tidak dapat menyadarkan diri pada bantuan Amerika Serikat, seandainya berlangsung konfrontasi fisik (Nugroho N, 1986 : 74).

Perubahan sikap Amerika Serikat yang sangat menguntungkan Indonesia itu, tidak lain karena keberhasilan Presiden Sukarno dalam safari diplomasinya ke Amerika pada awal jabatan Presiden Kennedy. Di samping karakter partai Demokrat memang lebih moderat daripada partai Republik, figur John F. Kennedy adalah seorang pemimpin yang tidak senang menciptakan konflik, yang hanya akan memberi peluang kepada berkembangnya komunisme. Kennedy yakin komunis dapat ditangkal dengan cara-cara inklusif dan pendekatan persuasif terhadap negara-negara yang sedang mencari jati dirinya, termasuk Indonesia (Michael Leifer, 1986 : 98).

D. Perjanjian Bunker

Jalan yang ditempuh oleh RI, dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan diplomasi selalu gagal. Tahun 1954, mulai dimasukkan dalam agenda PBB, kemudian diulang kembali di tahun 1955, 1956, 1957 dan seterusnya namun selalu terjegal oleh negara-negara Barat yang mendominasi PBB. Sebenarnya Indonesia tidak berniat untuk menaklukkan salah satu bagian dari dunia yang bukan miliknya. Bangsa Indonesia bukan bangsa ekspansionis, tetapi oleh karena jalan diplomasi sudah sulit ditempuh, maka bangsa Indonesia akan menjawabnya dengan meriam (Cindy Adams, 1966 : 424).

Untuk menghadapi sikap keras kepala Belanda dengan kekuatan negara-negara Barat dibelakangnya, rakyat Indonesia makin bersemangat untuk membebaskan Irian Barat. Dengan dorongan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat segera bersiap-siap untuk

perang melawan Belanda, apapun yang terjadi. Sukarelawan-sukarelawan sebagai spontanitas dari gema Tri Komando Rakyat, terbentuk dimana-mana. Usaha-usaha penyerangan dan pendaratan ke Irian Barat dipersiapkan secara matang dan terperinci (Baharuddin Lopa, 1962 : 75).

Belanda segera mengaktifkan Dewan Papua yang didirikan pada tanggal 5 April 1961 dengan bendera dan lagu Papua sendiri, dengan janji akan diikuti oleh pembentukan negara Papua Merdeka seratus persen. Tindakan Belanda ini diimbangi oleh Presiden Sukarno dengan mengadakan ceramah-ceramah dan pidato-pidato untuk mengobarkan semangat konfrontasi di segala bidang bagi rakyat. Dengan melibatkan rakyat sipil dalam pembebasan Irian Barat, mereka segera dilatih perang dan penggunaan senjata modern secara intensif (Baharuddin Lopa, 1962 : 76).

Melihat sikap dan perjuangan bangsa Indonesia terutama dalam mempersiapkan konfrontasi militer melawan Belanda di Irian Barat, negara-negara yang mula-mula mendukung Belanda, mengubah haluan dengan mengusahakan agar dimulai kembali perundingan damai antara Indonesia-Belanda. Mereka khawatir apabila terjadi perang terbuka antara Indonesia-Belanda, pasti akan menyeret negara-negara Blok Barat dan Blok Timur, sehingga akan menyulut Perang Dunia III.

Kedatangan Subandrio ke Amerika Serikat, menyadarkan Presiden Kennedy untuk menekan Belanda menyetujui usul-usul Bunker yang pernah macet. Presiden John F. Kennedy pernah mengirimkan diplomat ulungnya yang bernama Elsworth Bunker untuk bersama-sama pejabat sementara Sekjen PBB U Than, guna menengahi pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan sempat terhenti karena Belanda berusaha agar setiap penyerahan harus bersyarat dan minta jaminan yang memuaskan, sedangkan Indonesia bersedia untuk berunding hanya yang menyangkut penyerahan Irian Barat.

Atas tekanan yang bertubi-tubi dari Amerika Serikat dengan negara-negara Barat lainnya, maka Belanda mau menerima usul-usul Bunker yang dahulu telah menjadi konsep kesepakatan antara Bunker, U Than dan Indonesia yang ditolak Belanda. Akhirnya Belanda mau menyerahkan Irian Barat tetapi melalui salah satu lembaga di bawah PBB dan menuntut agar di kemudian hari diadakan plebisit untuk rakyat Irian Barat. Indonesia dapat menerima tuntutan tersebut, asal plebisit dilaksanakan setelah Indonesia secara administratif telah menerima kekuasaan dari UNTEA (Samawi, 1970 : 113).

Pada tanggal 15 Agustus 1962, Markas Besar PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata kepada dua belah pihak yang bertikai. Di Markas PBB pada waktu itu pula ditandatangani persetujuan antara Indonesia dengan Belanda, yang dikenal dengan Persetujuan New York. Persetujuan itu berisi :

1. Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962, penguasa atas Irian Barat dipegang oleh pemerintah sementara PBB, yang diwakili oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) dan akan tiba di Irian Barat untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda.
2. Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) akan menggunakan tenaga yang berasal dari putra-putri Indonesia, putra Irian Barat dan sisa pegawai Belanda.
3. Pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap berada di sana, namun ada di bawah kekuasaan pemerintahan sementara (UNTEA).
4. Angkatan Perang Belanda secara bertahap dikembalikan ke negerinya, sedangkan sisa pasukan yang belum dipulangkan berada di bawah pengawasan UNTEA.
5. Antara wilayah Irian Barat dengan wilayah Indonesia lainnya berlaku lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar, di samping bendera PBB. Bendera Belanda sudah diturunkan sejak 1 Oktober 1962.

7. Tanggal 1 Mei 1963 pemulangan anggota sipil dan militer Belanda harus sudah selesai. Sejak 1 Mei 1963 pemerintah Indonesia sudah resmi menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA.
8. Selambat-lambatnya akhir tahun 1969, pemerintah Indonesia harus melaksanakan penentuan pendapat rakyat (Pepera), dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak harus menerima hasil Pepera tersebut.
9. Untuk menjamin keamanan Irian Barat, PBB menempatkan pasukan perdamaian yang dinamakan UNSF (United Nations Security Forces) di bawah pimpinan Brigadir Jendral Said Uddin Khan dari Pakistan (Samawi, 1970 : 114).

Mendengar isi Persetujuan New York yang diusulkan oleh Diplomat Senior Amerika Serikat yang bernama Bunker, rakyat Irian Barat menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Rakyat Irian Barat memandang, bahwa waktu penyerahan Irian Barat dari UNTEA ke Indonesia terlalu lama. Di beberapa daerah di Irian Barat, rakyat turun ke jalan-jalan berdemonstrasi menuntut untuk mempersingkat masa pemerintahan sementara PBB dan ingin mempercepat pelaksanaan Pepera paling lambat tanggal 14-2-1963. Keputusan New York tidak terpengaruh oleh aksi demonstrasi tersebut, UNTEA dan UNSF tetap bertugas sesuai persetujuan (Samawi, 1970 : 116).

Pada tanggal 23 Maret 1963, lima orang putra Irian Barat datang ke Istana Negara menemui Presiden Sukarno untuk menyerahkan Piagam Kota Baru (Jayapura), yang berisi kesetiaan kepada pemerintah RI. Ke lima tokoh tersebut adalah Herman Wajoi, A.B. Kurubuy, J. Dimara, Lucas Roemkorem dan A. Mallo. Kepada wakil dari Irian ini, Presiden Sukarno menyerahkan bendera Merah Putih (Samawi, 1970 : 117).

Sebenarnya rakyat Irian Barat menginginkan bergabung dengan RI. Pada waktu dilakukan upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada RI tanggal 1 Mei 1963,

rakyat Irian Barat menyambutnya dengan sangat gembira. Menjadi utuhlah sekarang wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang hingga ke Merauke, sesuai dengan Proklamasi 17-8-1945.

E. Penentuan Pendapat Rakyat

Atas dasar persetujuan New York tertanggal 5 Agustus 1962, maka penentuan pendapat rakyat Irian Barat akan dilaksanakan pada tahun 1969. Belanda memang sangat ngotot, bahwa rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan sikapnya untuk bergabung dengan Indonesia atau akan berdiri sendiri sebagai suatu negara merdeka yang bebas. Tuntutan ini disetujui oleh Indonesia, asal pelaksanaan pendapat rakyat Irian Barat dilakukan setelah secara administratif Irian Barat diserahkan kepada Indonesia terlebih dahulu.

Sebenarnya rakyat Indonesia khususnya rakyat di Irian Barat sudah tidak memerlukan adanya penentuan pendapat rakyat, karena semenjak penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI, rakyat Irian Barat sudah merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Rakyat Irian Barat telah mengutus 5 orang putra Irian menghadap Presiden Sukarno, untuk menyampaikan Piagam Kotabaru, yang berisi kesetiaan rakyat Irian Barat kepada Republik Indonesia. Mereka bahkan tidak setuju apabila diadakan penentuan pendapat rakyat, karena sudah merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi.

Oleh karena keputusan Pepera sudah masuk agenda persetujuan New York dan tidak dapat ditolak dan dibantah lagi, maka ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab yang besar. Sebagai suatu bangsa yang besar dan berlandaskan hukum, maka Indonesia juga harus senantiasa menta'ati hukum internasional

yang telah disepakati bersama. Apabila bangsa Indonesia selalu melanggar kesepakatan, pasti akan dikucilkan oleh dunia internasional, sehingga tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari luar.

Untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat ini, akan diadakan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tatacara penyelenggaraan Pepera.
2. Setelah tatacara disetujui, kemudian diselenggarakan tahap ke dua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera, yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1.026 anggota dari delapan Kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.
3. Tahap ke tiga adalah Pepera itu sendiri, yang dilakukan di kabupaten-kabupaten mulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera dalam setiap tingkatannya disaksikan oleh utusan Sekretaris Jendral PBB, Duta Besar Ortis Sanz, sedangkan sidang-sidang Dewan Musyawarah Pepera dihadiri pula oleh beberapa duta besar asing di Jakarta, antara lain Duta Besar Belanda dan Duta Besar Australia. Dari pengamatan mereka, sejak dari tahap pertama, kedua, ketiga dan hasilnya ternyata dilaksanakan secara bersih dan tidak ada manipulasi sedikitpun, baik dari petugas maupun peserta Pepera (Moedjanto, 1988 : 125).

Hasil-hasil Pepera ini dikemudian dibawa ke New York oleh Duta Besar Ortis Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke 24. Pada tanggal 19 Nopember 1969, Sidang Umum PBB ke 24 tersebut menyetujui resolusi Belanda, Malaysia, Muangthai, Belgia, Luxemburg, serta Indonesia agar Sidang Umum PBB itu menerima hasil-hasil

Pepera, yang telah dilaksanakan sesuai dengan jiwa dan isi Persetujuan New York (Moedjanto, 1988 : 126).

Resolusi dari beberapa negara termasuk Indonesia dan Belanda ini menunjukkan bahwa telah terjadi saling pengertian, yang membuka jalan bagi terwujudnya persahabatan antara Indonesia dengan Belanda, untuk melupakan masa lalu yang penuh kepahitan. Mulailah lembaran baru bagi kedua negara untuk bersama-sama menyumbangkan tenaga, pikiran dan dana demi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi. Di samping itu juga perlu sekali diwujudkan hubungannya ke dua negara yang saling menguntungkan, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan (Samawi, 1970 : 114).

F. Irian Barat Menjadi Propinsi Ke-26

Sejak tanggal 17 Agustus 1956, sebelas tahun setelah diproklamlirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Irian Barat diresmikan menjadi sebuah propinsi, bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ibu kotanya ditunjuk Soa Sio dan sebagai gubernurnya diangkatlah Sultan Tidore Zainal Abidin Syah.

Setelah masa peralihan dan dari UNTEA diserahkan kepada Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963, maka Irian Barat dijadikan daerah propinsi yang ke 26 dengan nama Propinsi Irian Jaya dengan ibu kotanya waktu itu disebut Sukarnapura (dulu bernama Kotabaru), kemudian oleh pemerintah Orde Baru diganti dengan Jayapura.

Setelah pelaksanaan Pepera, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.12 tahun 1969 tertanggal 10 September 1969 tentang Irian Barat. Disebutkan bahwa Irian Barat menjadi propinsi yang ke 26 dengan ibu kotanya di kota Jayapura. Luas wilayahnya ada 419.660 km², yang berarti 21,99% nya luas Indonesia atau hampir seperempatnya Indonesia. Luas wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi darat

dan lautnya hampir seluas benua Eropa. Posisi Irian Jaya terletak pada 1 derajat Lintang Selatan, 9 derajat Lintang Selatan dan 129 derajat - 141 derajat Bujur Timur.

Jumlah penduduknya berdasarkan sensus pada tahun 1980 ada 1.173.871 jiwa dan pada sensus tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhannya ada 1.629.087 jiwa. Rumpun bangsa penduduk Irian Jaya asli termasuk rumpun Melanesia dan terdiri dari 126 suku. Makanan pokoknya adalah ketela rambat dan sagu. Hasil pertaniannya setelah menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, yaitu padi, jagung, kacang, kedelai dan hasil perkebunannya antara lain cengkih, kopi, lada, kelapa sawit. Tanah Irian Jaya juga kaya akan benda-benda tambang antara lain emas, perak, tembaga dan lain-lainnya (Iwan Gayo, 1992 : 119).

Dalam penelitian secara acak pada tahun 1990, peserta didik dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, dapat diketahui sebagai berikut :

1. Jumlah siswa Sekolah Dasar ada 253.578 orang.
2. Jumlah siswa SLTP ada 55.893 orang.
3. Jumlah siswa SMTA ada 22.212 orang.
4. Jumlah Mahasiswa /i ada 8.744 orang (Iwan Gayo, 1992 : 120).

Perguruan Tinggi yang besar di Irian Jaya ada di Jayapura dengan nama Universitas Cenderawasih, sedangkan di kota-kota lainnya sudah mulai bermunculan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta.

Agama yang dianut oleh penduduk asli Irian Jaya paling banyak adalah agama Kristen/Katolik ada 87%, Islam 12%, Hindu 0.036%, Budha 0,725%. Sisanya masih menggunakan aliran kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masuk 46.989.000.000,- rupiah, sedangkan keluar 67.915.000.000,- rupiah. Jalan raya negara 1.614 km, jalan propinsi 1.321 km, jalan kabupaten 5.163 km.

Tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan Gubernur Irian Jaya adalah :

1. Zainal Abidin Syah (1956 - 1961)
2. P. Pamudji (1961 - 1962)
3. Elizer Bonay (1962 - 1964)
4. Frans Kaisiepo (1964 - 1973)
5. Aqup Zainal (1973 - 1975)
6. Sutran (1975 - 1981)
7. Busir Suryowinoto (1981 - 1982)
8. Izaak Hindom (1982 - 1987)
9. Izzav Hindom (1987 - 1988)
10. Barnabas Zuebu, SH (1988 - 1993)
11. Drs. Yacob Pattipi (1993 -) (Iwan Gayo, 1992 : 121)

Irian Jaya mempunyai lambang seperti berikut :



Bentuknya perisai berpaju lima, yang berarti kesiapsiagaan dan ketahanan. Paju lima merupakan lima sila Pancasila. Gambar 3 buah tugu berdiri tegar di atas tumpukan batu tersusun 6 dan 9 menggambarkan perjuangan Trikora dan kemenangan Pepera tahun 1969.

Padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 8, terikat pita merah bertekuk 4 terjurai 5 dengan arti keseluruhan, yaitu hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tiga gunung berjajar sama tinggi dan berpuncak salju, menggambarkan pegunungan Jayawijaya, sebagai ciri khas tanah Irian yang indah, serta potensial sebagai obyek pariwisata dan kaya akan hasil hutan dan tambangnya.

Irian Jaya mempunyai jalan terpanjang antara Abepura-Waris sejauh 108 km dan jalan terpendek antara kota Fak-Fak-Torea.

Propinsi Irian Jaya mempunyai 14 Kabupaten/Kotamadya sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Penduduk Sensus	Ibukota
	1	2	3
1	Jayapura	111.326	Jayapura
2	Biak Numfor	90.766	Biak Numfor
3	Yapen Waropen	64.074	Serui
4	Manokwari	128.207	Manokwari
5	Sorong	198.729	Sorong
6	Fak-Fak	87.404	Fak-Fak
7	Merauke	243.023	Merauke
8	Jayawijaya	347.612	Wamena
9	Kodya Jayapura	21.126	Jayapura
10	Paniai	223.290	Nabire
11	Nabire (Kodya)	91.360	Nabire
12	Kabtif Puncak Jaya	60.204	Mulya
13	Kabtif Paniai	108.284	Enarotali
14	Kabtif Mimika	19.583	Timika

(Iwan Gayo, 1992 : 122)

BAB VI

KESIMPULAN

Konfrontasi total melalui Tri Komando Rakyat, yang dikumandangkan oleh Presiden Sukarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, merupakan puncak kesabaran bangsa Indonesia yang telah lama ditahannya. Kesabaran pada akhirnya akan melampaui titik jenuh, manakala terus ditahan dalam keadaan tertekan dan teraniaya, apalagi yang menyangkut tentang harga diri dan martabat suatu bangsa. Bangsa Indonesia sudah menderita sejak tiga setengah abad yang lalu dalam belenggu kolonialisme Belanda, dengan segala bentuk penindasan dan pemerasannya, akhirnya bangkit untuk menuntut keadilan dan kebebasan. Kedaulatan RI tidak akan sempurna, sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di depan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwa pencanangan Tri Komando Rakyat didasarkan atas kerinduan terhadap suasana kehidupan yang tenteram, aman, tertib, sejahtera, rukun dan damai, seperti yang sudah pernah dialami oleh nenek-moyang bangsa Indonesia pada jaman Sriwijaya dan Majapahit. Imperium Sriwijaya dan Majapahit dapat menciptakan perdamaian dunia, khususnya di seluruh kawasan Asia Tenggara, baik dengan negeri Tiongkok, India maupun negeri lainnya.

Semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa serta tanah air, yang ditanamkan oleh pergerakan-pergerakan kebangsaan berhasil membongkar pagar pemisah kesukuan, keagamaan, ras dan antar golongan, sehingga mempertebal semangat persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan nasional ini berhasil melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh kawasan Nusantara, yang kemudian berkembang menjadi

suatu wawasan atau cara pandang terhadap perwujudan kepulauan Nusantara, sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dari Sabang sampai ke Merauke.

Ke dua, bahwa perjuangan diplomasi sebelum Tri Komando Rakyat tidak pernah membawa hasil, bahkan selalu mengalami kegagalan. Seluruh Kabinet yang memegang pemerintahan sejak RIS kembali ke NKRI senantiasa mencantumkan program tentang usaha pengembalian Irian Barat secara damai. Setiap usaha diplomatik selalu terhambat oleh sikap Belanda, yang menyatakan bahwa masalah Irian Barat bukan masalah Indonesia, melainkan masalah dekolonisasi Belanda yang akan memberikan kemerdekaan kepada Irian Barat. Presiden Sukarno menyampaikan masalah Irian Barat ini ke Sidang Umum PBB, melalui pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Kembali" (To Build the World Anew), namun juga tidak menggoyahkan posisi Belanda, karena PBB masih didominasi oleh negara-negara Barat.

Ke tiga, bahwa pelaksanaan Tri Komandi Rakyat, merupakan gertakan yang disertai dengan konfrontasi, yang mula-mula diawali dengan pembatalan sepihak UNI Indonesia-Belanda dan pembatalan hasil-hasil KMB. Konfrontasi ekonomi segera diberlakukan dengan pemogokan total oleh para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Tindakan ini kemudian disusul dengan pelarangan beredarnya semua mass media dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Pesawat-pesawat milik KLM dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah NKRI. Segala aktivitas perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dibekukan mulai tanggal 2 Desember 1957. Pemerintah juga memperkuat pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang dilakukan oleh para buruh Indonesia.

Untuk menggalang seluruh kekuatan rakyat dalam menyatakan konfrontasi terhadap Belanda, maka pemerintah membentuk Front nasional Pembebasan Irian Barat, yang

kemudian disusul dengan Tri Komando Rakyat. Kegiatan infiltrasi TNI yang dibantu oleh pasukan sukarelawan putra-putra bangsa, mulai merambah daerah-daerah di Irian Barat. Dalam pertempuran terbuka di Laut Aru yang tidak seimbang, gugurlah Komodor Yos Sudarso bersama seluruh awak kapal MTB Macan Tutul sebagai pahlawan.

Pertempuran Laut Aru semakin mendorong semangat untuk menghalau Belanda dari Irian Barat, sehingga kekuatan pasukan kita makin ditingkatkan dengan persenjataan modern bantuan dari Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya. Pasukan Belanda yang semula meremehkan kemampuan TNI, menjadi tercengang karena tidak menduga bahwa TNI dan pasukan sukarelawan telah menduduki beberapa daerah di wilayah Irian Barat.

Ke empat, bahwa negara-negara Barat dan Presiden John F. Kennedy mencemaskan perkembangan yang dapat mengganggu stabilitas internasional di Asia Tenggara dan Pasifik, karena sikap keras kepala Belanda akan semakin mendekatkan RI ke kubu Uni Soviet. Apabila perang, mata-mata U2 Amerika telah berhasil merekam gerakan pasukan Indonesia, yang sangat besar jumlahnya dengan peralatan perang yang modern.

Amerika Serikat mendesak kepada Belanda untuk menerima Rencana Bunker. Sebagai gantinya Amerika akan memberikan jaminan ekonomi kepada Belanda, sehingga lepasnya Irian Barat dari tangannya, tidak akan menyiksa perekonomian Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani Perjanjian New York antara Menlu Subandrio yang mewakili RI dengan van Royen dan Schuurmann yang mewakili Belanda. Sekjen PBB U Than dan Bunker menyaksikan penanda tangan tersebut, di Markas Besar PBB.

Penyelesaian sengketa Irian Barat membuka jalan bagi persahabatan RI dengan Belanda. Setelah tahun 1965 hubungan RI-Belanda makin erat dan banyak sekali bantuan Belanda kepada RI lewat IGGL. Dalam persoalan Pepera menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R.M.
1964 *Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sejarah Asia Tenggara*, Penerbit Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Adams, Cindy
1966 *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta.
- Budiarto, M
1980 *Wawasan Nusantara Dan Peraturan Perundang-Undangan Negara RI*, Ghalis Indonesia, Jakarta.
- Burger, D.H.
1960 *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, PN. Pradnya Paramita d/a J.B. Walters, Jakarta.
- Darmono Hardjowidjono
1967 *Sejarah Asia Tenggara*, Fakultas Sastra & Kebudayaan, UGM, Yogyakarta.
- Hatta, M
1982 *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Penerbit Tinta Mas Jakarta.
- I Gusti Ngurah Agung
1992 *Metode Penelitian Sosial : Penelitian dan Pemakaian Praktis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Iwan Gayo
1977 *Buku Pinter, Seri Senior*, Penerbit UWN, Jakarta.
- Leifer, Michael
1986 *Politik Luar Negeri Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mokoginta, A.J.
1964 *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Staf Angkatan Bersenjata, Jakarta.
- Mudjanto, G
1988 *Indonesia Abad ke 20 1*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Mudjanto, G
1988 *Indonesia Abad 20 2*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi
1987 *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Nugroho Notosusanto

1981 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945 - 1949*, PT Tira Pustaka, Jakarta.

Nugroho Notosusanto

1981 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950 - 1964*, PT Tira Pustaka, Jakarta.

Nugroho Notosusanto

1981 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1973*, PT Tira Pustaka, Jakarta.

Nugroho Notosusanto

1981 *Sejarah Indonesia 3*, Depdikbud, Jakarta.

Nugroho Nososusanto

1986 *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta.

Nasution, A.H.

1985 *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 5 Kenangan Masa Orde Lama*, Gunung Agung, Jakarta.

Pringgodigdo, A.K.

1964 *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Pustaka Rakyat, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo

1990 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kolonialisme*, PT Gramedia, Jakarta.

Samawi

1992 *25 Tahun Merdeka*, BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Sumadi Suryobroto

1989 *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta

Soenjoto Kartodarmodjo, M

1978 *Yos Sudarso*, Penerbit Wijaya, Jakarta.

Soeroto, A

1974 *Pahlawan Aru*, Penerbit Yayasan Cemerlang, Jakarta.

Soebardjo, Ahmad

1978 *Lahirnya Republik Indonesia*, PT Kinta, Bandung.

Supardo Cs

1960 *Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia*, Dep. PP&K, Jakarta.

Soehardjo H.S.

1983 *Sejarah Asia Tenggara I*, Jurusan Sejarah Dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Soehardjo H.S.

1983 *Sejarah Asia Tenggara II*, Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Soesanto Tirtiprodjo

1989 *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta.

Soekarno

1964 *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta.

Sutarjo Adikusilo J.R.

1991 *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX*, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Sutarjo Adikusilo J.R.

1996 *Nasionalisme di Berbagai Negara*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

